RANCANGAN AKHIR

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

RENCANA KERJA TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 di lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2024-2026.

Penyusunan Renja ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Data yang digunakan dalam Rencana Kerja ini bersumber pada Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor merupakan dokumen perencanaan yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2026, perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif untuk pelaksanaan tugas di masa mendatang sangat diharapkan. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga Rencana Kerja ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2026 ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja DinasKoperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor di masa mendatang

Cibinong, 29 April 2025

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKRETARIS		
KASUBAG PROG		

IMAN WAHYU BUDIANA, ST, MM

NIP. 197010251999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.2 LANDASAN HUKUM 12
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 18
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 18
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2024 20
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD 20
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 65
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 72
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 86
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN MASYARAKAT 109
BAB III TUJUAN DAN SASARAN 124
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI. 124
3.2 TUJUAN, DAN SASARAN RENJA SKPD 132
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 136
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 139
BAB V PENUTUP 168

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 24 TAHUN 2025
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 disusun secara simultan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Di samping itu, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026 menjadi bagian dari tahapan “fondasi” periode perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029, yang telah dipertimbangkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, substansi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026 telah memedomani tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program-program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, serta tujuan dan sasaran daerah, yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja, dan
6. Penetapan Renja.

khususnya dalam tahap kelima, perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disinkronisasikan dengan substansi yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 memiliki dinamika tersendiri. Sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah wajib menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 berdasarkan Kewenangan Urusan Pilihan pada Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, dimana dokumen tersebut memuat substansi rencana program dan kegiatan yang disertai dengan target kinerja perangkat daerah tahun 2026 dan rencana pendanaan serta sumber pendanaannya yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026.

Adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memberikan warna baru dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menangah tahun 2025 yang ditandai dengan adanya perubahan revolusioner pada program dan kegiatan yang diampu, serta adanya penambahan sub-sub kegiatan yang mengiringi kegiatan. Hal ini berkonsekuensi dilakukannya pemetaan yang mensinergikan seluruh program sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menangah dengan program yang telah ditentukan secara seragam oleh pemerintah untuk seluruh kabupaten/kota se- Indonesia, mulai tahun 2026.

Rencana kerja menurut Peraturan Pemerintah **Nomor 12 Tahun 2019** adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut, Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menangah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menangah untuk periode tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menangah sebagai penjabaran dari urusan wajib yang berkaitan dengan non pelayanan dasar, bidang urusan koperasi dan ukm, serta sub urusan yang telah ditetapkan. Renja ini disusun dengan tetap mempedomani Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menangah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2026.

Selanjutnya, Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2026 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.

Tahapan selanjutnya yaitu Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Dalam tahap penyusunan rancangan awal renja perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain berpedoman pada Renstra, juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan

bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD, dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor. Hasil dari Forum Perangkat Daerah merumuskan usulan-usulan untuk menyempurnakan Rancangan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.

Rancangan Renja PD selanjutnya dilakukan penajaman terhadap program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Hasil penyempurnaan tersebut menjadi Rancangan Akhir Renja perangkat Daerah.Rancangan Akhir Renja ini kemudian diverifikasi oleh Bappedalitbang, yang selanjutnya menjadi Pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dengan dilakukannya RPJMD Transisi Tahun 2025-2029, maka penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan pembangunan Daerah provinsi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan demikian, penyusunan Renja Perangkat Daerah diarahkan untuk menjabarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 sebagaimana juga terintegrasi dengan penyusunan substansi RKPD Tahun 2026, selain itu terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Bogor dan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang bersamaa waktu disusun dan dalam tahap penyusunan akhir.

Renstra Strategis (Renstra) 2025-2029 menjabarkan perencanaan pembangunan 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, serta mempedomani Visi dan Misi Bupati Terpilih. Mengingat RPJMD dan Renstra belum ditetapkan, maka nantinya Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Selain terintegrasi dengan Renstra PD, Renja 2026 dalam penyusunannya juga memperhatikan Renstra Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementrian/Lembaga.

Dalam menentukan kebutuhan anggaran dan program prioritas serta batas maksimal anggaran yang dianggarkan dalam Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2026 telah berpedoman pada RKPD 2026.

Bahwa Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor tahun 2026 telah terintegrasi dengan RKPD, dan telah mengacu pada Rancangan Akhir Renstra Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor 2025-2029 serta RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, juga telah sesuai dengan dengan Renstra Propinsi Jawa Barat dan Renstra Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, selain itu dalam penentuan anggarannya telah sinkron dengan RKPD Kabupaten Bogor 2026.

Pada Renja 2026, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor mendukung prioritas pembangunan misi ke dua, yaitu Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Daerah (PDRB Sekunder dan Tersier). Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Indikator Kinerja Utama Daerah yang didukung adalah PDRB ADHB.

Untuk itu, penyusunan Rencana Kerja (Renja) harus dilakukan secara serius terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, sehingga seluruh target indikator yang menjadi kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dicapai sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Keterkaitan antara Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan dokumen RKPD.

1) Prioritas Pembangunan daerah tahun 2025 berdasarkan Program/Kegiatan Renstra Perubahan 2024-2026:

Tabel 1.1
Keterkaitan Renja terhadap RKPD Tahun 2026 Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OUTCOME		TARGET	
		TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
Stabilisasi Ekonomi Daerah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Koperasi Simpan Pinjam yang berizin	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin	9.57	%
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	31.79	%
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	45.09	%
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Prosentase SDM koperasi yang dilatih	4.69	%
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	33.57	%
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	13,64	%
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha	Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha	58,94	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	poin

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OUTCOME		TARGET	
		TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
		Daerah			
			Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	80	poin

a. Pencapaian target Indikator (IKU) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

1) IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Tabel 1.2
Pencapaian Target Sasaran Daerah (IKU) Tahun 2025 Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

PROGRAM	OUTCOME		TUJUAN DAN SASARAN PD	KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	KINERJA SASARAN DAERAH		
	TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
			Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas koperasi dan Usaha Mikro	- Persentase pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	64.60	%	**Tujuan :** Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,2	%
							Sasaran 1 : Meningkatnya daya saing daerah	PDRB atas dasar harga berlaku	244.05	(Triliun Rp)
							Sasaran 2 : Kualitas pelayanan publik meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	%
				Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	10.00	%	-			
			Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Tingkat Produktivitas Koperasi	85.79	%				
				Persentase Koperasi Aktif	37	%				

PROGRAM	OUTCOME		TUJUAN DAN SASARAN PD	KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	KINERJA SASARAN DAERAH		
	TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
			Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Mikro	Persentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT	29.53	%				
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Tertib Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin		Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin	32.47	%				
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Prosentase Koperasi yang berkualitas		Prosentase Koperasi yang berkualitas	12.17	%				
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Tersedianya data Tingkat Kesehatan Koperasi	Persentase Koperasi yang berpredikat Sehat		Persentase Koperasi yang berpredikat Sehat	15.6	%				
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya SDM Koperasi yang Dilatih	Prosentase SDM koperasi yang dilatih		Prosentase SDM koperasi yang dilatih	4.32	%				
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang di Restrukturisasi	Prosentase Koperasi yang di Restrukturisasi		Prosentase Koperasi yang di Restrukturisasi	6.42	%				
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Mikro yang kapabel (yang berizin dan bermitra)		Persentase Usaha Mikro yang kapabel (yang berizin dan bermitra)	0.7	%				
Program Pengembangan UMKM	Terfasilitasinya Peningkatan Level Usaha Mikro	Presentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha		Presentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha	0.131	%				

PROGRAM	OUTCOME		TUJUAN DAN SASARAN PD	KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	KINERJA SASARAN DAERAH		
	TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah	68	poin				
		Nilai IKM Internal Perangkat Daerah		Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	80	poin				

Kondisi perubahan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut harus diterapkan dalam perencanaan tahun 2025. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, mulai tahun 2025berubah, dan wajib mengakomodir seluruh ketentuan tersebut. Namun demikian, Kementerian Dalam Negeri telah mengarahkan bahwa dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2025, perlu mengintegrasikan program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam RPD transisi dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut dalam bentuk pemetaan program dan kegiatan, beserta target-target pencapaian pada masing-masing level di Perangkat Daerah.

Untuk itu, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) harus dilakukan secara serius terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2025, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, sehingga seluruh target indikator yang menjadi kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dicapai sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan

b. Keterkaitan Renja 2025 dengan Program Prioritas Pembangunan Nasional

1) Keterkaitan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Program Prioritas Pembangunan Nasional berdasarkan Renstra transisi 2024-2026:

2) Keterkaitan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan Program Prioritas Pembangunan Nasional berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019:

Tabel 1.3
Keterkaitan Renja terhadap Prioritas Pembangunan Nasional
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1		2	3	4	5	6	7
		-					
1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Mikro yang kapabel (yang berizin dan bermitra)	0.7	%	5,693,575,371
		Program Pengembangan UMKM	Terfasilitasinya Peningkatan Level Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan menjadi wirausaha	0.131	%	3,093,623,127
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Tertib Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin	32.47	%	1,322,084,234
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Prosentase Koperasi yang berkualitas	12.17	%	1,178,632,279
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Tersedianya data Tingkat Kesehatan Koperasi	Persentase Koperasi yang berpredikat Sehat	15.60	%	1,262,305,948
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya SDM Koperasi yang Dilatih	Prosentase SDM koperasi yang dilatih	4.32	%	1,395,748,751
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang di Restrukturisasi	Prosentase Koperasi yang di Restrukturisasi	6.42	%	1,847,356,904
		-					**15.793.326.613**

c. Keterkaitan Renja 2025 dengan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

1) Keterkaitan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019:

Tabel 1.4
Keterkaitan Renja terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1		2	3	4	5	6	7
		-					
1	Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Mikro yang kapabel (yang berizin dan bermitra)	0.7	%	5,693,575,371
		Program Pengembangan UMKM	Terfasilitasinya Peningkatan Level Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan menjadi wirausaha	0.131	%	3,093,623,127
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Tertib Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin	32.47	%	1,322,084,234
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Prosentase Koperasi yang berkualitas	12.17	%	1,178,632,279
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Tersedianya data Tingkat Kesehatan Koperasi	Persentase Koperasi yang berpredikat Sehat	15.60	%	1,262,305,948
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya SDM Koperasi yang Dilatih	Prosentase SDM koperasi yang dilatih	4.32	%	1,395,748,751
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang di Restrukturisasi	Prosentase Koperasi yang di Restrukturisasi	6.42	%	1,847,356,904
		-					**15.793.326.613**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memiliki kekhususan tersendiri jika dibandingkan dengan Renja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pemberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kondisi perubahan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut harus diterapkan dalam perencanaan tahun 2025. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, mulai tahun 2025 berubah, dan wajib mengakomodir seluruh ketentuan tersebut. Namun demikian, Kementerian Dalam Negeri telah mengarahkan bahwa dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2025, perlu mengintegrasikan program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam RPJMD dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut dalam bentuk pemetaan program dan kegiatan, beserta target-target pencapaian pada masing-masing level di Perangkat Daerah.

Fungsi dan Kedudukan Renja SKPD tahun 2025 terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah:

1. Renja SKPD tahun 2025 merupakan penjabaran visi, misi dan program serta kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, yang tercantum dalam Renstra SKPD tahun 2024-2026. Renja SKPD mengacu pada RKPD, serta memeperhatikan Renja Kementrian/Lembaga dan Renja OPD Provinsi terkait.
2. Renja SKPD tahun 2025 menjadi pedoman SKPD dan Kecamatan dalam perencanaan anggaran tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2025 didasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang **Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

11. Undangan-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Pemerintah **Nomor 17 Tahun 2017** tentangSinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Pemerintah **Nomor 45 Tahun 2017** tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. **Permendagri No.86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. **Perppu Nomor 1 Tahun 2020** untuk Tangani Pandemi Covid-19;
27. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
29. **Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021** Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
31. **Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 70 Tahun 2019** tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);;
32. **Permendagri No.90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

34. Perubahan atas **Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020** tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
35. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor.07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan transisional Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik;
38. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Biro (Lembaran daerah Tahun 2014 Nomor 5 seri E) tanggal 6 Januari 2014;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 - 2036;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

41. Peraturan Bupati Bogor **Nomor 21 Tahun 2022** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bogor;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
43. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 12)
44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 23)
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

Tujuan disusun Renja 2026adalah:

1. Menjadi panduan dalam perumusan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2025.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pada tahun 2026.
3. Menjadi panduan penyusunan rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2026dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dalam proses penyusunan Renja juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renja.

Sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2026 sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sitematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISKOPUKM TAHUN 2023

Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telaahan Kebijakan Nasional, dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan Rencana dan Pendanaan Perangkat daerah selama 1 Tahun kedepan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

URUSAN : **WAJIB NON PILIHAN DASAR**

BIDANG URUSAN : **KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

PERANGKAT DAERAH : **DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

KODE					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI						TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (10-9)/9)*100
2		**1 1**	**0 1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**											
			0 1	00 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening yang dibayarkan	Jenis	4	3	-	-		-	-	-	-
			0 1	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	Unit	19	22	-	-		-	-	-	-
			0 1	00 03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan yang dibayar	Orang	12	8	-	-		-	-	-	-

			01	0004	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	Orang	2	2	-	-		-	-	-	-
			01	0005	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	40	66	-	-		-	-	-	-
			01	0006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis	32	32	-	-		-	-	-	-
			01	0007	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis	13	13	-	-		-	-	-	-
			01	0008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	Jenis	15	15	-	-		-	-	-	-
			01	0009	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis	3	3	-	-		-	-	-	-
			01	0010	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang diberi jamuan makanan dan minuman	Jamuan	1,620	1680	-	-		-	-	-	-
			01	0011	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	kali	92	75	-	-		-	-	-	-
			01	0012	Pelayanan Dokumentasi dan	Jenis dan jumlah arsip yang ditata	Dokumen	1	1	-	-		-	-	-	-

					Arsip SKPD											
			01	0013	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokuman administrasi kepegawaian yang dikelola	Dokumen	1	1	-	-		-	-	-	-
			01	0014	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Jumlah Dokumen administrasi barang	Dokumen	-	5	-	-		-	-	-	-
			01	0015	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas keamanan kantor	Orang		12	-	-		-	-	-	-
2		**11**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**					-	-		-	-	-	-
			2	0001	Penyusunan Detail Engineering Design (DED)	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	0	-	-		-	-	-	-
			2	0002	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah kebutuhan : Software, Handphone/Tablet	Unit	38	2	-	-		-	-	-	-
			02	0003	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Jenis	18	6	-	-		-	-	-	-
			02	0004	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Jenis	14	14	-	-		-	-	-	-
			02	0005	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	gedung	2	2	-	-		-	-	-	-
			02	0006	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	Jumlah Jaringan Komputer yang dipelihara	Jaringan	1	1	-	-		-	-	-	-

					Komputerisasi											
			02	0007	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional dinas yang dipelihara	Unit	22	22	-	-		-	-	-	-
			02	0029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Unit	41	23	-	-		-	-	-	-
		11	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**					-	-		-	-	-	-
			03	0001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jenis Pengadaan Pakaian Dinas	Jenis	0	4	-	-		-	-	-	-
2		**11**	**04**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**					-	-		-	-	-	-
			04	0001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendididkan dan pelatihan	orang	12	12	-	-		-	-	-	-
			04	0002	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti pembinaan mental dan rohani, Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti senam	orang	100	60	-	-		-	-	-	-
2		**11**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan**					-	-		-	-	-	-

					Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
			05	0001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kantor	Dok	4	3	-	-		-	-	-	-
			05	0002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran	Dok	1	1	-	-		-	-	-	-
			05	0003	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Dok	1	1	-	-		-	-	-	-
			05	0004	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dan jenis Dokumen Perencanaan Anggaran	Dok	4	4	-	-		-	-	-	-
			05	0005	Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan program/kegiatan; Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	Dok	1	1	-	-		-	-	-	-
			05	0006	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Dok	1	1	-	-		-	-	-	-
			05	0007	Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah Publikasi Media yang terselenggara	kali	10	10	-	-		-	-	-	-

			05	0008	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen renja SKPD	Dok	1	1	-	-		-	-	-	-
			05	0009	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah dokumen renja SKPD	Dok	0	1	-	-		-	-	-	-
2		**11**	**11**		**Program Penataan Koperasi**					-	-		-	-	-	-
			11	0001	Revitalisasi Dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Pola Syariah	Jumlah Dewan Pengawas Syariah yang mengikuti revitalisasi	Orang	20	60	-	-		-	-	-	-
			11	0002	Verifikasi Proses Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Surat Izin Simpan Pinjam Koperasi yang dikeluarkan	Surat Izin	200	50	-	-		-	-	-	-
			11	0003	Verifikasi Proses perizinan pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu	Jumlah Surat Izin Kantor Cabang dan cabang pembantu	Surat Izin	20	10	-	-		-	-	-	-
2		**11**	**12**		**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**					-	-		-	-	-	-
			12	0001	Sosialisasi dan Konsolidasi Koperasi Pola Syariah	Jumlah Peserta Penyuluhan, Sosialisasi dan Konsolidasi	Koperasi	60	80	-	-		-	-	-	-
			12	0002	Penyusunan dan Pemutakhiran data keragaan pengembangan koperasi Pola	Jumlah Data Koperasi Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen	0	1	-	-		-	-	-	-

					syariah											
			1 2	00 03	Pemeringkatan Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Koperasi yang diperingkat, Koperasi yang berprestasi	kop	50	50	-	-		-	-	-	-
			1 2	00 04	Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Berbadan hukum	kop	32	30	-	-		-	-	-	-
			1 2	00 05	Pemutakhiran Data Koperasi Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Data Koperasi Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen	0	1	-	-		-	-	-	-
			1 2	00 06	Penerapan sanksi dan proses pembubaran Kopersi	Jumlah operasi yang rencana dibubarkan	kop	80	80	-	-		-	-	-	-
			1 2	00 07	Advokasi Dan Pembinaan Teknik Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Advokasi	kop	80	50	-	-		-	-	-	-
			1 2	00 08	Penyelenggaraan Gemaskop (Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi)	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Perkoperasian	Orang	160	500	-	-		-	-	-	-
2		**1 1**	**1 3**		**Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi**					-	-		-	-	-	-
			1 3	00 01	Evaluasi Hasil Pemeriksaan KSPPS dan USPPS Koperasi	Jumlah Usaha KSPPS dan USPPS Koperasi yang di Evaluasi	Kop	0	16	-	-		-	-	-	-

						dan diperiksa										
			1 3	00 02	Pembinaan dan Pengawasan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang Dilakukan Pengawasan	Kop	160	80	-	-		-	-	-	-
			1 3	00 03	Penilaian Kesehatan Koperasi, Pemantauan dan Pemeriksaan KSP/USP Koperasi	Jumlah Penilaian Koperasi	Kop	70	70	-	-		-	-	-	-
2		**1 1**	**1 4**		**Program Peningkatan SDM Koperasi**					-	-		-	-	-	-
			1 4	00 01	Pelatihan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk pengembangan koperasi pola syariah	Jumlah Peserta Assesment DPS	Orang	0	100	-	-		-	-	-	-
			1 4	00 02	Sertifikasi Profesi Koperasi Syariah	Jumlah Sertifikasi Profesi Koperasi Syariah	Orang	0	50	-	-		-	-	-	-
			1 4	00 03	Pengembangan Koperasi Pola Syariah	Jumlah Peserta Pengembangan Koperasi Syariah	Orang	100	60	-	-		-	-	-	-
			1 4	00 04	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Pengelola/Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Pengelola /Manajer KSP/USP Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	Orang	0	20	-	-		-	-	-	-

					(USP) Koperasi											
			14	0005	Pelatihan Pengawas Koperasi	Jumlah Peserta Pelatihan Pengawas Koperasi bagi Pengurus/Pengawas Koperasi	Kop	30	30	-	-		-	-	-	-
			14	0006	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi /Koperasi Unit Desa (KUD)	Jumlah Pengurus/Pengelola dan Anggota Koperasi yang mengikuti Pelatihan Maajemen Koperasi	Orang	30	30	-	-		-	-	-	-
			14	0007	Pelatihan Akuntansi Koperasi	Jumlah Pengurus/Bendahara/Juru Buku Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Akuntansi	Orang	40	75	-	-		-	-	-	-
2		**11**	**15**		**Program Pemberdayaan Koperasi**					-	-		-	-	-	-
			15	0001	Pelatihan Perkoperasian Bagi Organisasi Pemuda, Siswa Siswi Slta, Kader Pembina Koperasi,Majelis	Jumlah Peserta bimtek bagi Pemuda/Pemudi, Siswa/Siswi SLTA, Kader Pembina Koperasi Majelis Taklim/Tokoh	Orang	300	120	-	-		-	-	-	-

					Taklim/tokoh Masyarakat	Masyarakat										
			1 5	00 02	Pelatihan Daya Dukung Perangkat Pemerintahan Desa berbasis Koperasi	Jumlah Sekel/Sekdes yang dilatih ketrampilan Perkoperasian	Orang	240	195	-	-		-	-	-	-
			1 5	00 03	Penyelenggaraan Hari Jadi Koperasi (Pertasi Kencana)	Jumlah Koperasi, Jumlah Penyelenggaan	Kec	40	40	-	-		-	-	-	-
			1 5	00 04	Pemantauan Dana Pemerintah Dan Pembinaan Bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang dipantau	Kop	40	40	-	-		-	-	-	-
			1 5	00 05	Peningkatan Dan Pengembangan Kerja Sama Usaha Koperasi	Jumlah Peserta/Koperasi yang mengikuti Temu Usaha dan Bimtek	Kop	100	30	-	-		-	-	-	-
			1 5	00 06	Pengembangan Usaha Koperasi Pada Komoditi Unggulan	Jumlah Peserta Pengembangan Usaha Koperasi	Orang	90	60	-	-		-	-	-	-
			2 3	00 07	Pembinaan Koperasi di Lokasi P2WKSS	Jumlah Orang yang mendapatkan pelatihan	Orang	20	60	-	-		-	-	-	-
2		**4**	**1 6**		**Program Peningkatan Kelembagaan, Legalitas Usaha dan Pengembangan**					-	-		-	-	-	-

					Usaha											
			16	0001	Penerapan Kebijakan Legalitas Usaha	Jumlah UMK yang menerima Legalitas Produk	UMKM	0	100	-	-		-	-	-	-
			16	0002	Pembinaan Manajemen Kewirausahaan di kawasan Agropolitan, Minapolitan, Geopark, Destinasi Wisata Kreatif, dan Pengembangan Kopi	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan manajemen dan Kewirausahaan	UMKM	0	120	-	-		-	-	-	-
			16	0003	Pendataan Usaha Mikro Kecil (UMK)	Jumlah UMKM yang di Data	UMKM	500	1500	-	-		-	-	-	-
			16	0004	Pembinaan Lembaga Usaha Mikro Kecil (UMK)	Jumlah UMKM yang dibina lembaganya	UMKM	40	40	-	-		-	-	-	-
			16	0005	Pembinaan dan Pengawasaan Usaha Mikro Kecil (UMK) Berprestasi	Jumlah UMKM yang dinilai dan Jumlah UMKM yang menerima penghargaan	UMKM	50	50	-	-		-	-	-	-
2		**11**	**17**		**Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Manajemen Usaha Mikro Kecil**					-	-		-	-	-	-

			17	0001	Peningkatan Kemampuan Manajemen Wira Usaha	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan manajemen dan Kewirausahaan	UMKM	100	140	-	-		-	-	-	-
			17	0002	Peningkatan dan Pengembangan Kampung Wira Usaha	Jumlah Kampung Wirausaha	Kampung	1	3	-	-		-	-	-	-
			17	0003	Penumbuhan Wira Usaha Baru	Jumlah calon wira usahaan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan magang	Orang	280	560	-	-		-	-	-	-
2		**11**	**18**		**Program Peningkatan dan Pengembangan Modal Usaha**					-	-		-	-	-	-
			18	0001	Pembinaan Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Mikro Kecil yang Dibina	Orang	40	114	-	-		-	-	-	-
			18	0002	Peningkatan Kemampuan Usaha Mikro Kecil (UMK) Penyusun Kelayakan Usaha	Jumlah Peserta Fasilitasi Penyusunan Kelayakan Usaha/Proposal Usaha	UMKM	40	40	-	-		-	-	-	-
			18	0003	Pemantauan Sumber Dana Pemerintah yang digunakan Modal Usaha Mikro Kecil	Jumlah UMK yang dipantau	UMKM	20	120	-	-		-	-	-	-

			18	0004	Penyusunan Kajian Pembentukan Kelembagaan Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	1	-	-		-	-	-	-
2		**11**	**19**		**Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran Produk UMKM**					-	-		-	-	-	-
			19	0001	Penyediaan Sarana Prasarana Penjualan Produk Usaha Mikro Kecil (UMK)	Jumlah Sarana dan Prasarana UMKM	Lokasi	0	14	-	-		-	-	-	-
			19	0002	Peningkatan dan Pengembangan Kemasan Produk	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kemasan produk	UMKM	0	105	-	-		-	-	-	-
			19	0003	Pengembangan Kemitraan Pemasaran Usaha Mikro Kecil (UMK)	Jumlah Kemitraan Pemasaran Usaha Mikro Kecil (UMK)	UMKM	40	100	-	-		-	-	-	-
			19	0004	Penyelenggaraan Festival dan Bazar Produk Usaha Mikro Kecil (UMK)	Jumlah Festival dan Bazar Produk Usaha Mikro Kecil (UMK)	Kali	2	14	-	-		-	-	-	-
			19	0005	Penyelenggaraan Pameran Produk UMK Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pameran Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kali	80	4	-	-		-	-	-	-
			19	0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan	Unit	-	15	-	-		-	-	-	-

			19	0007	Pengelolaan Klinik Konsultasi Bisnis Usaha Mikro Kecil (UMK)	Jumlah UKM yang berkonsultasi,	UMKM	250	100	-	-		-	-	-	-
											-		-	-	-	-
					<u>Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah</u>	**Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Aparatur Dinas**		-	-		-		-	-	-	-
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening yang dibayarkan	Jenis	-	-	3	-		-	-	-	-
				2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	Jenis	-	-	5	-		-	-	-	-
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis	-	-	1	-		-	-	-	-
				4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang diberi jamuan makanan dan minuman	Jamuan	-	-	100	-		-	-	-	-
				5	Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang	Dokumen	-	-	0	-		-	-	-	-
				6	Penyediaan Pelayanan	Jenis dan jumlah arsip yang ditata	Dokumen	-	-	0	-		-	-	-	-

					Dokumentasi dan Arsip SKPD											
				7	Pengelolaan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas keamanan kantor	Orang	-	-	16	-		-	-	-	-
				8	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan yang dibayar, Jumlah alat Kebersihan Kantor yang tersedia	Orang	-	-	11	-		-	-	-	-
				9	Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional /Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	Unit	-	-	10	-		-	-	-	-
				10	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor : Barang Cetakan, Barang ALat Tulis Kantor dan Penggandaan	Jenis	-	-	50	-		-	-	-	-
				11	Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis	-	-	13	-		-	-	-	-
				12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Gedung	-	-	2	-		-	-	-	-
				13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan operasional dinas yang dipelihara : Kendaraan Roda 4, Kendaraan	Unit	-	-	10	-		-	-	-	-

						Roda 2										
				14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah kebutuhan : Software, Handphone/Tablet	Unit	-	-	0	-		-	-	-	-
				15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Jumlah Jaringan Komputer yang dipelihara	Jenis	-	-	0	-		-	-	-	-
				16	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	kali	-	-	60	-		-	-	-	-
				17	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	Orang	-	-	2	-		-	-	-	-
				18	Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti pembinaan mental dan rohani	orang	-	-	100	-		-	-	-	-
				19	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokuman administrasi kepegawaian yang dikelola	Dokumen	-	-	1	-		-	-	-	-
				20	Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendididkan dan pelatihan	Orang	-	-	0	-		-	-	-	-

				21	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Dokumen	-	-	0	-		-	-	-	-
				22	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan program/kegiatan; Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	Dokumen	-	-	1	-		-	-	-	-
				23	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas	Dokumen	-	-	1	-		-	-	-	-
				24	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jenis Dokumen Perencanaan Anggaran	Dokumen	-	-	1	-		-	-	-	-
				25	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra SKPD	Dokumen	-	-	2	-		-	-	-	-
				26	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Dokumen	-	-	1	-		-	-	-	-
				27	Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah Publikasi Media yang terselenggara	Media	-	-	0	-		-	-	-	-
					Program Kelembagaan dan Pengawasan			-	-	-	-		-	-	-	-
				1	Pembinaan Kelembagaan dan Perizinan	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan	Koperasi	-	-	84	-		-	-	-	-

						Kelembagaan dan Perizinan										
				2	Kegiatan Pembinaan Peran Perangkat Koperasi dan Regulasi Perkoperasian	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Peran Perangkat Koperasi dan Regulasi Perkoperasian	Koperasi	-	-	100	-		-	-	-	-
				3	Kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan	Jumlah Peserta / Koperasi yang diawasi, diperiksa dan dinilai kesehatan koperasi	Koperasi	-	-		-		-	-	-	-
					Program Pemberdayaan dan			-	-	-	-		-	-	-	-
					Pengembangan Koperasi			-	-	-	-		-	-	-	-
				1	Pembinaan Usaha Koperasi	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Usaha Koperasi	Orang	-	-	193	-		-	-	-	-
				2	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Usaha Koperasi	Orang	-	-	30	-		-	-	-	-
				3	Kegiatan Pengembangan SDM Koperasi	Jumlah Peserta Kegiatan Pengembangan SDM Koperasi	Orang	-	-	95	-		-	-	-	-
					Program Pemberdayaan			-	-	-	-		-	-	-	-

					Usaha Mikro											
				1	Pembinaan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Usaha Mikro	Orang	-	-	20	-		-	-	-	-
				2	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	Orang	-	-	120	-		-	-	-	-
				3	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	Orang	-	-	170	-		-	-	-	-
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang kapabel (yang berizin dan bermitra)**	**%**	-	-	-	0.47	0.63	0.62	12.13	11.56	95.30
2	17	07	2		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	-	-	-	0.49	0.76	0.73	8.40	8.11	96.55
						Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	-	-	-	0.23	0.18	0.15	2.12	2.05	96.70

						Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	-	-	-	0.03	0.09	0.04	0.46	0.45	97.83
						Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	-	-	-	0.12	0.18	0.33	2.89	2.79	96.54
						Rasio Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	-	-	-	11.20	3.82	9.61	5.15	11.14	
						Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	-	-	-	24.58	27.21	19.22	15.46	41.50	
				01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	-	-	-	1,411	2,505	2,411	1,500	1,236	82.40
				02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang bermitra	Unit Usaha	-	-	-	705	591	478	735	-	-
				03	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha Mikro yang diberikan pendampingan dan pengembangan melalui lembaga pendampingan	Unit Usaha	-	-	-	64	280	120	100	100	100.00
				04	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	Unit Usaha	-	-	-	866	1,321	2,424	1000	1,000	100.00

						perijinannya										
				05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro dan Aparatur yang di sosialisasi tentang kebijakan UMKM	Unit Usaha	-	-	-		40.00	330.00	330	330.00	100.00
				06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yang ditiingkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang						80.00	60	80.00	133.33
2	**17**	**07**			**Program Pengembangan UMKM**	**Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha**	**%**	-	-	-	0.20	0.12	0.118	57.740	58.540	101.39
2	17	07	2		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Mikro Menjadi Kecil	Prosentase juumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	-	-	-	53.39	19.48	14.48	54.42	89.64	164.72
				01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Usaha Mikro	-	-	-	210	1,140	550	440	440	100.00

2	**17**	**02**			**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin**	**%**	-	-	-	29.00	29.87	32.43	42.73	44.33	103.74
2	17	02	2		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	-	-	-	29.00	29.87	32.43	8.70	8.06	92.64
						Persentase fasilitasi penerbitan sertitikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	-	-	-	6.24	6.96	3.09	3.20	3.45	107.81
				01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi simpan pinjam	Jumlah Koperasi yang didorong dan dilakukan verifikasi untuk memiliki Izin Simpan Pinjam	Unit Usaha	-	-	-	25.00	28.00	72.00	20	20.00	100.00

					Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	%	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-
				01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi simpan pinjam untuk koperasi denga wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten /kota	Jumlah Koperasi yang didorong untuk membuat izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	Unit Usaha	-	-	-	25	28	31	2	-	-
2	**17**	**03**			**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Prosentase Koperasi yang berkualitas**	**%**	-	-	-	9.84	9.86	10.30	25.03	33.41	133.48
2	17	03	2		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	%	-	-	-	36.16	39.04	42.42	20.03	31.59	157.71

				01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan kualitas Koperasi berpedoman regulasi perkoperasian	Unit Usaha	-	-	-	197	221	260	180	180	100.00
				02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundangan-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diterapkan sanksi sesuai peraturan	Unit Usaha	-	-	-	50	64	70	160	160	100.00
2	**17**	**04**			**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Predikat Koperasi Sehat**	**%**	-	-	-	33.02	25.79	35.93	40.00	29.09	72.73
2	17	04	2		Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	-	-	-	17.45	15.15	22.94	34.63	9.72	28.07
				01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dilaksanakan penilaian kesehatannya	Unit Usaha	-	-	-	37	60	70	80	80	100.00
				02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kesehatan KSP/USP Koperasi yang diberi penghargaan	Unit Usaha	-	-	-	37	60	70	0	-	#DIV/0!
2	**17**	**05**			**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Prosentase SDM koperasi yang dilatih**	**%**	-	-	-	2.94	2.54	4.91	3.35	4.48	133.73

2	17	05	2		Pendidikan dan Latihan Prkoperasian bagi koperasi yang wilayah kenaggotaan dalam Daerah Kabuapten/Kota	Persentase jumlah, anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	-	-	-	2.94	3.89	4.91	3.35	4.48	133.73
						Persentase jumlah, koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	-	-	-	23.87	54.79	25.71	33.79	38.88	115.06
						Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	-	-	-	3.95	1.80	2.57	3.13	3.77	120.45
				01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan pengetahuannya	Orang	-	-	-	260	270	275	280	280	100.00

					Koperasi											
2	**1 7**	**0 6**			**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Tingkat Produktivitas Koperasi**	**%**	-	-	-	113.9 6	92.24	128.1 6	6.26	6.44	102.88
2	1 7	0 6	2		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	-	-	-	4.10	8.22	3.86	5.01	6.32	126.15
						Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	-	-	-	4.25	5.07	3.86	2.50	3.89	155.60
						Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	-	-	-	4.10	8.22	3.86	3.13	6.32	201.92

						Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	-	-	-	1.46	5.48	5.14	3.10	3.10	100.00
						Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	-	-	-	18.74	26.85	22.24	18.77	22.36	119.13
				01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan ditingkatkan melalui Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Unit Usaha	-	-	-	100	110	120	140	140	100.00

				02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga						40	50	50	100.00
2	**17**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah**	**%**	-	-	-	100	100	100	-	-	-
						Nilai IKM Internal Perangkat Daera	**Poin**	-	-	-	-	-	-	80	83	103.78
2	17	01	2		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	10	10	10	10	10	100.00
						Nilai AKIP Perangkat Daerah	**Poin**	-	-	-	-	-	-	71.55	71.55	100.00
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	2	2	2	2	2	100.00
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	100.00
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	100.00
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Kali	-	-	-	1	1	1	1	1	100.00

				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	100.00
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	-	3	3	3	3	3	100.00
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	-	1	1	1	1	1	100.00
2	**17**	**01**	**2**		**Administrasi Keuangan**	**Persentase realisasi anggaran perangkat daaerah**	**%**	-	-	-	100	100	100	100	100	100.00
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	-	-	-	57	48	42	42	42	100.00
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	-	-	57	48	1	1	1	100.00
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-	-	633	633	1	1	1	100.00
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	100.00
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	100.00

						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
				06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	-	-	1	-	1	1	1	100.00
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	-	-	-	1	1	1	1	1	100.00
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	100.00
2	**17**	**01**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu**	**%**	-	-	-	100	100	100	100	100	100.00
				01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-	58	100	0	0	0	#DIV/0!
				02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	8	8	1	1	1	100.00

				03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-		7	0	0	0	#DIV/0!
2	**1 7**	**0 1**	**2. 1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum**	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100.00
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	11	11	11	1	1	100.00
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	7	7	7	11	11	100.00
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	-	30	30	30	1	1	100.00
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	2	2	2	4	4	100.00
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	-	-	32	32	32	2	2	100.00
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	-	3	-	0	1	1	100.00

				07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	-	3,728	3,728	0	1	1	100.00
				08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	-	713	713	713	1	1	100.00
				09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	40	1	1	1	1	100.00
2	17	01	2.1		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Unit	-	-	-	-	-	100	100	100	100.00
				01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	2	9	9	100.00
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-	-	-		-				#DIV/0!
				03	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	-	-	-		-				#DIV/0!
2	17	01	2.1		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100.00
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	-	2	1	1	-	-	#DIV/0!
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	-	-	-	3	3	3	1	1	100.00

						yang Disediakan										
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	-	26	11	11	1	1	100.00
2	**1 7**	**0 1**	**2. 1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik**	**%**	-	-	-	100	100	100	100	100	100.00
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	-	5	5	5	18	18	100.00
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	-	-	26	21	21	5	5	100.00
				03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	-	4	5	5	0	0	#DIV/0!
				04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	48	3	3	65	65	100.00
				05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	-	-	-	1	1	1	1	1	100.00

						i										
				06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	20	1	1	30	30	100.00
				07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	1	-	-	#DIV/0!

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Kabupaten Bogor Tahun 2024, maka evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Kabupaten Bogor Tahun 2024 dan capaian Renstra Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Pada Tahun 2024 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor menetapkan sebanyak 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama / Indikator Tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu:

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor melaksanakan 8 Program dengan 14 Kegiatan 46 Sub Kegiatan dengan besaran anggaran belanja Rp. 19.330.426.415,-.

Total realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor pada Triwulan IV tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 18.635.873.379,- atau sebesar 96.41 % dari total anggaran sebesar Rp. 19.330.426.415,- anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 694.553.036,- yang dirinci berdasarkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).

Capaian program ini adalah Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil melalui 1 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.875.084.450,- sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi Rp. 2.755.579.401,- atau 95,30 % sisa anggaran sebesar Rp. 119.505.049,-

Sementara secara lengkap uraian mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.875.084.450,- sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 2.755.579.401,- atau 95,30 % sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 119.505.049,- keluarannya adalah Terwujudnya

Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan Indikator Kegiatan dari rencana :

1. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) dengan target sebesar 8.40 % realisasinya 8.11 % .
2. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra dengan target sebesar 2.12 % realisasinya 2.05 % .
3. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan dengan target sebesar 0.46 % realisasinya 0.45 % .
4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha dengan target sebesar 2.89 % realisasinya 2.79 % .
5. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan dengan target sebesar 15.46 % realisasinya 41.50 %.
6. Rasio Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro dengan target sebesar 5.15 % realisasinya 11.14 %.

2) Program Pengembangan UMKM.

Capaian program ini adalah meningkatnya Pengembangan UMKM melalui pelaksanaan 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.325.613.366,- sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 1.278.091.375,- atau 96.42 % dengan pelaksanaan 1 kegiatan sisa anggaran sebesar Rp.47.521.991,-

Sementara secara lengkap uraian mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Mikro Menjadi Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.325.613.366,- sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 1.278.091.375,- atau 96.42 % sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 47.521.991,- keluarannya adalah Terwujudnya usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan, pemasaran dan wirausaha baru yang berskala mikro untuk pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Mikro Menjadi Kecil dengan Indikator Kegiatan dari rencana:

1. Prosentase juumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran dengan target sebesar 54.42 % realisasinya 89.64 %.

3) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.

Capaian Program ini adalah Tertib Usaha Koperasi melalui pelaksanaan 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 626.914.071,- sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 600.003.602,- atau 95.71 % sisa anggaran sebesar Rp. 26.910.469;-.

Sementara secara lengkap uraian mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi anggaran Rp. 626.914.071,- atau 95.71 % dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 600.003.602,- dengan sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 26.910.469,- keluarannya adalah Terwujudnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator target sebagai berikut :
   1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan target sebesar 8.70 % realisasinya 8.06 %.
   2. Persentase fasilitasi penerbitan sertitikat Nomor lnduk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan target sebesar 3.20 % realisasinya 3,45 %.
b) Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota (Kegiatan di Drop diperubahan Anggaran) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0 % dengan keluarannya adalah dengan indikator target sebagai berikut :
   i. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan

pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota dengan target sebesar 0 % realisasinya 0 %.

4) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

Capaian program ini adalah Prosentase Koperasi yang berkualitas melalui pelaksanaan 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.033.216.472,- sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 1.010.681.277,- atau 97,82 % dengan pelaksanaan 1 kegiatan sisa anggaran sebesar Rp. 22.535.195,-

Sementara secara lengkap uraian mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.033.216.472,- sampai dengan bulan Desember terealisasi sesebar Rp. 1.010.681.277,- atau 97,82 % sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 22.535.195,- keluarannya adalah Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dengan Indikator Kegiatan dari rencana:

   i. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota dengan target sebesar 25.00 % realisasinya 33.41 %.

5) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

Capaian Program ini adalah Tersedianya data Tingkat Kesehatan Koperasi melalui pelaksanaan 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 334.510.167,- sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 322.186.693,- atau 96.32 % sisa anggaran sebesar Rp. 12.323.474;-
Sementara secara lengkap uraian mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah 1 (Satu) Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 334.510.167,- atau 96.32 % dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 322.186.693,- dengan sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 12.323.474,- keluarannya adalah Terwujudnya usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah

keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan indikator target sebagai berikut :

i. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan target sebesar 40 % realisasinya 29.09 %.

6) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.

Capaian Program ini adalah Meningkatnya SDM Koperasi yang Dilatih melalui pelaksanaan 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.357.488.960,- sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp.347.947.668,- atau 97.33 % sisa anggaran sebesar Rp.9.541.292;-

Sementara secara lengkap uraian mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah kenaggotaan dalam Daerah Kabuapten/Kota dengan alokasi anggaran Rp.357.488.960,- atau 97.33 % dan yang sudah terealisasi sebesar Rp.347.947.668,- dengan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.9.541.292,- keluarannya adalah Terwujudnya koperasi, anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan indikator target sebagai berikut :

1. Persentase jumlah, anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan target sebesar 3.35 % realisasinya 4,48 %.
2. Persentase jumlah, koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan target sebesar 33.79 % realisasinya 38.88 %
3. Persentase jumlah, koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan target sebesar 3.13 % realisasinya 3.77 %.

7) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Capaian Program ini adalah Meningkatnya Koperasi yang di Restrukturisasi melalui pelaksanaan 1 kegiatan dengan anggaran

sebesar Rp.507.569.639,- sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp.478.215.884,- atau 94,22 % sisa anggaran sebesar Rp29.353.755.;-

Sementara secara lengkap uraian mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp.507.569.639,- atau 94,22 % dan yang sudah terealisasi sebesar Rp.478.215.884,- dengan sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. Rp29.353.755,- keluarannya adalah Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui Fasilitas pembiayaan, fasilitasi pemasaran, fasilitasi kemitraan, fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha dengan indikator target sebagai berikut :

1. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan dengan target sebesar 5.01 % realisasinya 6.32 %.
2. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan target sebesar 2.50 % realisasinya 3,89 %
3. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan target sebesar 3.13 % realisasinya 6.32 %.
4. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan target sebesar 3.10 % realisasinya 3.10 %.
5. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan target sebesar 18.77 % realisasinya 22,36 %.

8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan.

Capaian program ini adalah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah melalui pelaksanaan 7 kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp.12.270.029.290,- sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp.11.843.167.479,-atau 96.52%, anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.426.861.811,-.

Sementara secara lengkap uraian mengenai pelaksanaan ke 7 kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran Rp.454.742.736,- terealisasi sebesar Rp.436.469.148,- atau 95.89 %, anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.18.273.588,- Keluarannya adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan indikator target 71.55 poin dan sudah terealisasi sebesar 71.55 poin atau 100.00 %.
b) Administrasi Keuangan dengan alokasi anggaran Rp.8.886.523.573,- terealisasi sebesar Rp. 8.704.466.181,- atau 97.95%, anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 182.057.392,- Keluarannya adalah
    i. Persentase Pegawai Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu dengan indikator target 100 % dan sudah terealisasi sebesar 100 % atau 100.00 %.
    ii. Persentase SPM yang Menjadi SPPD Tepat Waktu dengan indikator target 100 % dan sudah terealisasi sebesar 100 % atau 100.00 %.
    iii. Persentase Kegiatan Yang Terpenuhi Kewajiban Pembayarannya dengan indikator target 100 % dan sudah terealisasi sebesar 100 % atau 100.00 %.
    iv. Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu dengan indikator target 100 % dan sudah terealisasi sebesar 100 % atau 100.00 %.
c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp.290.966.589,- terealisasi sebesar Rp.262.663.379,- atau 90.27%, anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 28.303.210,- Keluarannya adalah Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu dengan indikator target 100 % dan sudah terealisasi sebesar 100 % atau 100.00 %.
d) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp.994.417.657,- terealisasi sebesar Rp.935.773.033,-atau 94.10%, anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 58.644.624,- Keluarannya adalah Terlaksananya Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan disiplinnya dengan indikator

i. Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum target 100 % dan sudah terealisasi sebesar 100 %atau 100.00 %.
ii. Nilai IKM Internal Perangkat Daerah target 100% dan sudah terealisasi sebesar 100 %atau 100.00 %.

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran Rp.46.650.969,- terealisasi sebesar Rp.44.225.000,- atau 94.80%, anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp.2.425.969,- Keluarannya adalah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator target 100 % dan sudah terealisasi sebesar 100 % .

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.1.046.906.666,- terealisasi sebesar Rp. 931.508.038,- atau 88.98%, anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp.115.398.628,- Keluarannya adalah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator target 100.00 %. dan sudah terealisasi sebesar 100.00 %.

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.549.821.100,- terealisasi sebesar Rp. 528.062.700,- atau 96.05%, anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp.11.315.178,- Keluarannya adalah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik dengan indikator target 100.00 % dan sudah terealisasi sebesar 100.00 %.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor dapat di sampaikan sebagai berikut:

i. Realisasi IKU Tujuan dan Sasaran yang tidak memenuhi target adalah tidak ada:

ii. Realisasi Program yang tidak memenuhi target adalah sebagai berikut:

a) Capaian Program Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro target sebesar 12.13 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 11.66 % atau dengan tingkat capaian 95.30 %.

b) Capaian Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator Persentase Koperasi yang berpredikat Sehat target sebesar 40 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 29.09 % atau dengan tingkat capaian 73.73 %.

iii. Realisasi Kegiatan yang tidak memenuhi target adalah sebagai berikut:

a) Capaian Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah 1 (Satu) Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota target sebesar 34.63 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 9.72 % atau dengan tingkat capaian 28.07 %.

iv. Realisasi IKU Tujuan dan Sasaran yang memenuhi target adalah sebagai berikut:

a) Tidak Ada

v. Realisasi Program yang memenuhi target adalah sebagai berikut:

a) Tidak ada.

vi. Realisasi Kegiatan yang memenuhi target adalah sebagai berikut:

a) Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebesar 100 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 100 % atau dengan tingkat capaian 100,00 %.

b) Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan dengan target sebesar 100,00 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 100,00 % atau dengan tingkat capaian 100,00 %.

c) Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target sebesar 100,00 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 100,00 % atau dengan tingkat capaian 100,00 %.

d) Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target sebesar 100,00 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 100,00 % atau dengan tingkat capaian 100,00 %.

e) Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target sebesar 100,00 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 100,00 % atau dengan tingkat capaian 100,00 %.

f) Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target sebesar 100,00 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 100,00 % atau dengan tingkat capaian 100,00 %

g) Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target sebesar 100,00 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 100,00 % atau dengan tingkat capaian 100,00 %

vii. Realisasi IKU Tujuan dan Sasaran yang melebihi target kinerja adalah sebagai berikut:

a) Capaian Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi target sebesar 0.67 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 0.71 % atau dengan tingkat capaian 105.97 %.

b) Capaian Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro target sebesar 1.08 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 1.16 % atau dengan tingkat capaian 107.41 %.

c) Capaian Persentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT target sebesar 25.13 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 33.41 % atau dengan tingkat capaian 132.97 %.

d) Capaian Volume Penjualan Produk Usaha Mikro target sebesar 103.908.000.000 sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 114.790.400.000atau dengan tingkat capaian 110.47 %.

viii. Realisasi Program yang melebihi target kinerja adalah sebagai berikut:

a) Capaian Program Pengembangan UMKM dengan indikator Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha target sebesar 57.74 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 58.54 % atau dengan tingkat capaian 101.39 %.

b) Capaian Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan indicator Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin target sebesar 42.73 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 44.03 % atau dengan tingkat capaian 103,47 %.

c) Capaian Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator Prosentase Koperasi yang berkualitas target sebesar 25.03 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 33.41 % atau dengan tingkat capaian 133.48 %.

d) Capaian Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Prosentase SDM koperasi yang dilatih target sebesar 3.35 %

sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 4,48 % atau dengan tingkat capaian 133.73 %.

e) Capaian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Prosentase Koperasi yang di Restrukturisasi target sebesar 6.25 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 6.44 % atau dengan tingkat capaian 102.88 %.

ix. Realisasi Kegiatan yang melebihi target kinerja adalah sebagai berikut:

a) Capaian Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan target:

- ✓ Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) sebesar 8.40 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 8.11 % atau dengan tingkat capaian 96.55 %.
- ✓ Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra sebesar 0.22 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 0.15 % atau dengan tingkat capaian 69,10 %
- ✓ Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan sebesar 0.02 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 0.04 % atau dengan tingkat capaian 181,82 %
- ✓ Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha sebesar 0.117 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 0.33 % atau dengan tingkat capaian 279,87 %
- ✓ Rasio Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro sebesar 9.61 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 9.61 % atau dengan tingkat capaian 100,00 %
- ✓ Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan sebesar 19.22 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 19.22 % atau dengan tingkat capaian 100,00 %

Dari Indikator diatas rata-rata Realisasi sebesar 138.51 %.

b) Capaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan Indikator sebagai berikut

- ✓ Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan target sebesar 31,17 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 32,43 % atau dengan tingkat capaian 104,04 %.
- ✓ Persentase fasilitasi penerbitan sertitikat Nomor lnduk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan target sebesar 3,34 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 3,55 % atau dengan tingkat capaian 106,33 %.

Dari Indikator diatas rata-rata Realisasi sebesar 105.18 %.

c) Capaian Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota target sebesar 41,32 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 42,42 % atau dengan tingkat capaian 102,66 %.

d) Capaian Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah 1 (Satu) Kabupaten/Kota dengan Indikator Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan target sebesar 17,32 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 42,47 % atau dengan tingkat capaian 245,21 %.

e) Capaian Kegiatan Pendidikan dan Latihan Prkoperasian bagi koperasi yang wilayah kenaggotaan dalam Daerah Kabuapten/Kota dengan target:

- ✓ Persentase jumlah, anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota sebesar 4.49 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 4.91 % atau dengan tingkat capaian 109,35 %.
- ✓ Persentase jumlah koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kotasebesar 28.10 % sampai

dengan akhir bulan Desember terealisasi 25.71 % atau dengan tingkat capaian 91,49 %

- ✓ Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota sebesar 3.97 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 2.57 % atau dengan tingkat capaian 64,74 %

Dari Indikator diatas rata-rata Realisasi sebesar 109.35 %.

e) Capaian Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator sebagai berikut:

- ✓ Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan target sebesar 4,84 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 3,86 % atau dengan tingkat capaian 79,75 %.
- ✓ Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan target sebesar 2,56 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 3,86 % atau dengan tingkat capaian 149,61 %.
- ✓ Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan target sebesar 2,58 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 5,14 % atau dengan tingkat capaian 199,22 %.
- ✓ Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dengan target sebesar 20,97 % sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi 22,24 % atau dengan tingkat capaian 106,06 %.

Dari Indikator diatas rata-rata Realisasi sebesar 122.88 %.

Faktor penghambat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

i. Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah Lemahnya koordinasi antar seksi dan bidang Lemahnya koordinasi antar seksi dan bidang.

ii. Faktor penghambat Indikator Tujuan adalah Sulitnya Pembubaran koperasi tidak aktif dikarenakan wewangan pusat.

iii. Faktor penghambat Indikator Sasaran adalah Perubahan Anggaran Laporan RAT koperasi banyak yang belum disampaikan ke Dinas.

iv. Faktor penghambat Indikator Program adalah Lemahnya kerjsama anatar seksi dan bidang.

Total rata-rata capaian Kinerja Output sebesar 109.59 %, Keuangan sebesar 90.47 % atau Penilaian Realisasi Kinerja "Sangat Tinggi". Hal ini disebabkan berbagai faktor diantaranya:

a) Pegawai yang memahami pekerjaan dan ketepatan dalam perencanaan anggaran.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah setelah Evaluasi Kinerja Triwulan IV.

Dari Faktor penghambat tersebut diatas maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berimplikasi terhadap kinerja daerah terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah sehingga Target kinerja tidak tercapai secara signifikan.

Dengan adannya hal tersebut maka Kepala Dinas Selaku pengambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran diantaranya dengan menerapkan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan target kinerja yang sudah disepakati selama lima tahun yang dituangkan kedalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor.

Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor ada 9 (sembilan) yaitu:

- Meningkatkan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi.
- Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
- Fasilitasi Peningkatan Predikat Koperasi
- Melakukan Pelatihan Perkoperasian.
- Fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi.
- Fasilitasi kemitraan UMKM dengan dunia usaha.
- Sertifikasi pelaku usaha mikro.
- Fasilitasi Pemasaran offline dan online produk usaha mikro.
- Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Usaha Mikro.

Secara lengkap Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Tahun 2024, dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.1. untuk capaian Pancakarsa dapat dilihat di Tabel 2.2

TABEL 2.3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH HINGGA TAHUN 2024

URUSAN : WAJIB NON PILIHAN DASAR

BIDANG URUSAN : KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI						TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
	TUJUAN										
1	Laju Volume Usaha Koperasi terhadap Modal Sendiri Koperasi	%	NA	2.94%	4.2	-	-		-	-	-
2	Laju Laba UMKM	%	NA	8.00%	2	-	-		-	-	-
							-				
	SASARAN						-				
1	Prosentase Koperasi Aktif dan sehat	%	31.54	35.68	35.44	-	-		-	-	-
2	Prosentase Usaha Mikro	%	NA	5.61	3.96	-	-		-	-	-

	yang dikembangkan menjadi Usaha Kecil										
	TUJUAN										
1	Persentase Koperasi Aktif	%	-	-	-	38.39	40.65	42.17			
2	Laju Omset Usaha Mikro	%				10.73	9.02	40.41			
	SASARAN										
1	Jumlah usaha koperasi yang melaksanakan RAT	Unit				175	177	190			
2	Persentase KSP/USP Koperasi sehat	%	-	-	-	10.25	8.22	10.67			
3	Rata-rata Omset Usaha Mikro	Rp	-	-	-	60,900,000	66,744,000	93,714,205			
	TUJUAN										
1	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	-	-	-	-	-	-	0.67	0.71	105.97
2	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha	%	-	-	-	-	-	-	1.08	1.16	107.41

	Mikro										
	SASARAN										
1	Persentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT	%	-	-	-	-	-	-	25.13	33.41	132.95
2	Volume Penjualan Produk Usaha Mikro	Rp	-	-	-	-	-	-	103,908,000,000	114,790,400,000	110.47

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang ke dua, yaitu Pengembangan Perekonomian Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal, kontribusi Pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) sebesar 114.20 %, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator kinerja kunci tersebut menunjukan bahwa fokus kebijakan tersebut diatas telah mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

1) Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi.
2) Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro.
3) Persentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT.
4) Volume Penjualan Produk Usaha Mikro.

Sedangkan keberhasilan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut :

(1) Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi, Pada tahun 2024 terealisasi 0.71 % dari target sebesar 0.67% orang dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 105.97%. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dipengaruhi oleh beberapa variable diantaranya banyaknya usaha koperasi baru yang tumbuh dan RAT yang tepat waktu di Kabupaten Bogor. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi mengalami kenaikan sebesar 0.04 %.

(2) Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro adalah angka yang menunjukan jumlah Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro, Pada tahun 2024 Jumlah Pertumbuhan Omset Usaha Mikro terealisasi 1.16 % dari target sebesar 1.08 % dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 107.41%. Pertumbuhan Omset Usaha Mikro dipengaruhi adanya Kenaikan omzet dari usaha mikro > 300 juta (pertahun).

(3) Persentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT yang melaksanakan RAT, Pada tahun 2024 terealisasi 33.41 % dari target sebesar 25.13 % dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 132.97%.

Pertumbuhan Jumlah usaha koperasi yang melaksanakan RAT dipengaruhi oleh beberapa variable diantaranya banyaknya Koperasi yang melaksanakan RAT sesuai Surat Edaran Bupati Kabupaten Bogor. Pertumbuhan Jumlah usaha koperasi yang melaksanakan RAT mengalami kenaikan sebesar 8.28%.

(4) Volume Penjualan Produk Usaha Mikro adalah angka yang menunjukan Volume Penjualan Produk Usaha Mikro per tahun Usaha Mikro Kabupaten Bogor sebesar Rp. 114.790.400.000,- dari target sebesar Rp. 103.908.000.000,- dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 110.47%. Volume Penjualan Produk Usaha Mikro dipengaruhi adanya peningkatan omzet dari usaha mikro > 300 juta (pertahun).

Capaian Oucome Program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

(1) Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro Pada tahun 2024 terealisasi 11.56 % dari target sebesar 12.13 % orang dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 95.30%. Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro dipengaruhi oleh beberapa variable diantaranya banyaknya usaha baru yang tumbuh di Kabupaten Bogor.

(2) Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha adalah angka yang menunjukan jumlah Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha, Pada tahun 2024 terealisasi 58.54 % dari target sebesar 57.74 % dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 101.39%. Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha dipengaruhi adanya peningkatan omzet dari usaha mikro > 300 juta (pertahun).

(3) Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin, Pada tahun 2024 terealisasi 44,33 % dari target sebesar 42.37 % dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 103.74%. Pertumbuhan Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin dipengaruhi oleh beberapa variable diantaranya kemudahan dalam pembuatan perizinan melalui system online dan sudah dibukanya moratorium izin simpan pinjam.

(4) Prosentase Koperasi yang berkualitas, pada tahun 2023 Persentase Prosentase Koperasi yang berkualitas terealisasi 33.41 % dari target sebesar 25.03 % dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 133.48%. Prosentase Koperasi yang berkualitas sudah mencapai

target >100% karena dipengaruhi adanya adanya koperasi yang yang melaporkan RAT tepat waktu ke Dinas Koperasi UKM.

(5) Persentase Koperasi yang berpredikat Sehat adalah Kesehatan usaha yang dijalankan koperasi di wilayah Kabupaten Bogor, dari target sebesar 40% dan terealisasi sebesar 29.09% dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 72.73%. Predikat Koperasi Sehat dipengaruhi adanya koperasi yang akan dinilai kesehatannya belum siap untuk di cek kesehatannya.

(6) Prosentase SDM koperasi yang dilatih adalah tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi yang ditingkatkan kemampuannya di wilayah Kabupaten Bogor, dari target sebesar 3.35% dan terealisasi sebesar 4,48% dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 133.73%. Prosentase SDM koperasi yang dilatih masih sudah mencapai target karena dipengaruhi adanya banyak koperasi yang mengirimkan para anggota dan pengurus untuk ikut mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pemerintah.

(7) Prosentase Koperasi yang di Restrukturisasi adalah proses penataan kembali struktur atau organisasi koperasi untuk meningkatkan kinerja, kesehatan keuangan, dan daya saing, dari target sebesar 6.26% dan terealisasi sebesar 6.44% dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 102.88%. Restrukturisasi Koperasi yang dinilai dan dicatat sudah melebihi target dikarenakan pengelolaan Modal yang sesuai dengan AD/ART koperasi dan bantuan / pendampingan yang diberikan pemerintah.

(8) Nilai IKM Internal Perangkat Daerah adalah penilain yang dilakukan pada internal Dinas terutama bidang sekretariat, dari target sebesar 71.55% dan terealisasi sebesar 71.55% dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, meliputi antara lain:

1. Lemahnya kemampuan sumber daya manusia aparatur Dinas Koperasi, UKM dalam pengembangan Koperasi, UKM.
2. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Koperasi, UKM kepada aparatur.
3. Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya sumber daya baik aparatur maupun sarana prasarana yang tersedia.

Secara lengkap Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel2.3

TABEL 2.3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH HINGGA TAHUN 2024

URUSAN : WAJIB NON PILIHAN DASAR

BIDANG URUSAN : KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI						TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
	TUJUAN										
1	Laju Volume Usaha Koperasi terhadap Modal Sendiri Koperasi	%	NA	2.94%	4.2	-	-		-	-	-
2	Laju Laba UMKM	%	NA	8.00%	2	-	-		-	-	-
							-				
	SASARAN						-				
1	Prosentase Koperasi	%	31.54	35.68	35.44	-	-		-	-	-

	Aktif dan sehat										
2	Prosentase Usaha Mikro yang dikembangkan menjadi Usaha Kecil	%	NA	5.61	3.96	-	-		-	-	-
	TUJUAN										
1	Persentase Koperasi Aktif	%	-	-	-	38.39	40.65	42.17			
2	Laju Omset Usaha Mikro	%				10.73	9.02	40.41			
	SASARAN										
1	Jumlah usaha koperasi yang melaksanakan RAT	Unit				175	177	190			
2	Persentase KSP/USP Koperasi sehat	%	-	-	-	10.25	8.22	10.67			
3	Rata-rata Omset Usaha Mikro	Rp	-	-	-	60,900,000	66,744,000	93,714,205			
	TUJUAN										

1	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	-	-	-	-	-	-	0.67	0.71	105.97
2	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	%	-	-	-	-	-	-	1.08	1.16	107.41
	SASARAN										
1	Persentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT	%	-	-	-	-	-	-	25.13	33.41	132.95
2	Volume Penjualan Produk Usaha Mikro	Rp	-	-	-	-	-	-	103,908,000,000	114,790,400,000	110.47

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor terdapat Indiaktor kinerja yang belum mencapai target dan dapat ditingkatkan dengan berbagai cara sebagai berikut :

i. Meningkatkan Capaian Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

a. Masih rendahnya kontribusi koperasi dalam peningklatan PDRB;
b. Masih perlu ditingkatkannya Usaha Mikro sebagai penggerak ekonomi;
c. Masih kurangnya Wirausaha baru yang layak dan inovatif;
d. Masih kurangnya minat generasi muda terhadap kewirausahaan;

Selain permasalahan tersebut diatas, terdapat Akar permasalahan yang dihadapai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor anatar lain :

a. Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi,
b. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk meningkatkan jumlah simpanan pokok dan wajib;
c. Kurangnya kewirausahaan pengurus koperasi dalam meningkatkan volume usaha;
d. Masih rendahnya kualitas SDM pengurus koperasi
e. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro;
f. Kurangnya akses permodalan usaha mikro;
g. Kurangnya Akses Pemasaran produk UMKM;
h. Kesadaran berkoperasi rendah;

Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah:

1) Optimalisasi produksi pertanian.
2) Penguatan ketahanan dan ketersediaan pangan.
3) Pemenuhan infrastruktur pendukung ekonomi.
4) Fasilitasi penyerapan produk melalui pasar, terutama e-commerce.
5) Penurunan tingkat pengangguran.
6) Penurunan angka kemiskinan dan optimalisasi pelayanan sosial.
7) Optimalisasi pemenuhan pelayanan dasar.
8) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM.
9) Optimalisasi kebijakan daerah dan sektoral lingkup kewenangan daerah.
10) Peningkatan transparansi penyelenggaraan pelayanan publikl.
11) Optimalisasi pelaksanaan kinerja berbasis teknologi informasi.
12) Pengembangan budaya kerja produktif, optimalisasi organisasi tata kerja, dan inovasi.
13) Revitalisasi gedung kantor pemerintah daerah.
14) Pemenuhan kebutuhan operasional kantor wajib dan mengikat.

Untuk Isu Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1) Digitalisasi Koperasi dan Usaha Mikro.
2) Fasilitasi dan pembinaan UMKM melalui penyusunan e-katalog untuk berpartisipasi dalam laman situs pengadaan barang dan jasa.
3) Pengembangan kampung wirausaha batik, golok dan Bambu.

Sedangkan Prioritas dan fokus pembangunan Tahun 2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Prioritas 1 : Stabilisasi Ekonomi Daerah

Prioritas 2 : Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi; dan

Prioritas 3 : Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah

Dari Tabel 2.3. di atas dapat diketahui bahwa dapat melaksanakan kinerja pelayanan dengan baik hal ini ditunjukan dengan rasio capaian tahun 2022 dan 2023 yang sebagian besar tidak melampaui target yang telah ditetapkan, Untuk 2023 Indikator Tujuan yaitu : Persentase Koperasi Aktif, Laju Omset Usaha Mikro. Untuk Indikator Sasaran yaitu: Jumlah usaha koperasi yang melaksanakan RAT, Persentase KSP/USP Koperasi sehat dan Rata-rata Omset Usaha Mikro tetapi dalam hal pencapaiaan kinerja tersebut sesuai dengan target semuanya tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

A. PERMASALAHAN

a. Bidang Koperasi

Permasalahan di bidang koperasi pada saat ini terjadi diberbagai unsur yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Permasalahan Struktural

1. Kelemahan manajemen disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat masih terbatas.
2. Kelangkaan modal disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat kita umumnya masih lemah, dan justru dengan berkoperasi mereka bersatu dan berupaya untuk tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang lebih kuat dan dapat diandalkan.

b) Permasalahan Kelembagaan

Masalah kelembagaan koperasi yang memerlukan langkah pemecahan di masa mendatang meliputi hal-hal:

1. Kelembagaan koperasi belum sepenuhnya mendukung gerak pengembangan usaha. Hal ini disebabkan adanya kekuatan, struktur dan pendekatan pengembangan kelembagaan yang kurang memadai bagi pengembangan usaha. Mekanismenya belum dapat dikembangkan secara fleksibel untuk mendukung meluas dan mendalamnya kegiatan usaha koperasi. Aspek kelembagaan yang banyak

dipermasalahahkan antara lain adalah daerah kerja, model kelembagaan koperasi produksi, koperasi konsumsi dan koperasi jasa, serta pemusatan koperasi.

2. Alat perlengkapan organisasi koperasi belum sepenuhnya berfungsi dengan baik. Hal ini antara lain disebabkan oleh:
   - ✓ Pengurus dan Badan Pemeriksa (BP) yang terpilih dalam rapat anggota serta pelaksana usaha pada umumnya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga kurang mampu untuk melaksanakan pengelolaan organisasi, manajemen dan usaha dengan baik, serta kurang tepat dalam menanggapi perkembangan lingkungan.
   - ✓ Mekanisme hubungan dan pembagian kerja antara Pengurus, Badan Pemeriksa dan Pelaksana Usaha (Manajer) masih belum berjalan dengan serasi dan saling mengisi.
   - ✓ Penyelenggaraan RAT koperasi masih belum dapat dilakukan secara tepat waktu dan dirasakan masih belum sepenuhnya menampung kesamaan kebutuhan, keinginan dan kepentingan dari pada anggotanya.

c) Permasalahan pengembangan usaha

1. Dalam pelaksanaan usaha, koperasi masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan kegiatan di berbagai sektor perekonomian karena belum memiliki kemampuan memanfaatkan kesempatan usaha yang tersedia.
2. Belum sepenuhnya tercipta jaringan mata rantai tataniaga yang efektif dan efisien, baik dalam pemasaran hasil produksi anggotanya maupun dalam distribusi bahan kebutuhan pokok para anggotanya.
3. Terbatasnya modal yang tersedia khususnya dalam bentuk kredit dengan persyaratan lunak untuk mengembangkan usaha, terutama yang menyangkut kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan anggota, di luar kegiatan program pemerintah. Selain itu koperasi masih belum mampu

melaksanakan pemupukan modlal sendiri yang mengakibatkan sangat tergantung pada kredit dari bank walaupun biayanya lebih mahal.

4. Keterbatasan jumlah dan jenis sarana usaha yang dimiliki koperasi, dan kemampuan para pengelola koperasi dalam mengelola sarana usaha yang telah dimiliki.
5. Belum terciptanya pola dan bentuk-bentuk kerjasama yang serasi, baik antar koperasi secara horizontal dan vertikal maupun kerjasama antara koperasi dengan BUMN dan Swasta.

d) Aspek Lingkungan Aspek lingkungan yang terdiri dari kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya, tidak dapat dilepaskan dari proses pengembangan koperasi. Di satu pihak kondisi tersebut dapat memberikan kesempatan, di pihak lain dapat menimbulkan hambatan bagi perkembangan koperasi. Adapun kondisi lingkungan yang dapat diidentifikasikan, sebagai berikut :

1. Kemauan politik yang kuat dalam upaya pengembangan koperasi, kurang diikuti dengan tindakan-tindakan yang konsisten dan konsekuen dari seluruh lapisan struktur birokrasi pemerintah.
2. Kurang adanya keterpaduan dan konsistensi antara program pengembangan koperasi dengan program pengembangan sub-sektor lain, sehingga program pengembangan sub-sektor koperasi seolah-olah berjalan sendiri, tanpa dukungan dan partisipasi dari program pengembangan sektor lainnya.
3. Dirasakan adanya praktek dunia usaha yang mengesampingkan semangat usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong-royong.
4. Masih adanya sebagian besar masyarakat yang belum memahami dan menghayati pentingnya berkoperasi sebagai satu pilihan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

5. Sikap sebagian besar masyarakat di lingkungan masyarakat yang miskin dirasakan masih sulit untuk diajak berusaha bersama, sehingga di lingkungan semacam itu kehidupan berkoperasi masih sukar dikembangkan.
6. Sebagai organisasi yang membawa unsur pembaruan, koperasi sering membawa nilai-nilai baru yang kadang-kadang kurang sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat yang lemah dan miskin terutama yang berada di pedesaan.

b. Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)

Secara umum Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Bogor saat ini memiliki kelemahan–kelemahan pada hal–hal berikut sehingga menimbulkan permasalahan dalam mengembangkan usahanya :

a) Penerapan sistem manajemen yang kurang baik
b) Kurangnya dalam membaca peluang pasar
c) Penerapan strategi pemasaran yang kurang efektif
d) Kurangnya modal kerja untuk menunjang pengembangan Usaha
e) Sistem produksi yang masih belum memenuhi standar
f) Ketergantungan bahan baku
g) Pengemasan produk yang kurang baik
h) Pengurusan perijinan yang masih rumit dan biaya tinggi

Secara khusus permasalahan lemahnya permodalan UMKM dikarenakan Pemberian kredit/Pinjaman kepada UMKM tidak dikenakan jaminan/agunan sehingga berdampak pada pengembalian angsuran menjadi kurang lancar/macet.

B. SOLUSI

a. Bidang Koperasi

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan reposisi peran koperasi yang secara mandiri dilakukan oleh koperasi. Keikutsertaan pemerintah dalam program ini dibatasi hanya sebagai fasilitator dan regulator, melalui suatu mekanisme yang menempatkan koperasi dan usaha kecil sejajar dengan

perusahaan-perusahaan milik swasta dan perusahaan milik pemerintah. Strategi tersebut merupakan langkah yang perlu ditempuh berdasarkan pemikiran bahwa dengan program ini memungkinkan permasalahan yang dihadapi koperasi dapat ditangani sekaligus. Dalam hal ini, selain koperasi memiliki kesempatan untuk eksis dalam usaha-usaha yang selama ini seakan "diharamkan" untuk koperasi, seperti dalam pengelolaan hutan dan ekspor/impor. Program ini juga sekaligus juga dapat membuktikan bahwa koperasi mampu berperan sebagai kelembagaan yang menopang pemberdayaan ekonomi rakyat dalam sistem ekonomi kerakyatan.

Pola reposisi peran Koperasi dan keberhasilan Koperasi dalam melaksanakan peranannya antara lain sangat ditentukan faktor-faktor sebagai berikut:

a) Kemampuan menciptakan posisi pasar dan pengawasan harga yang layak,
b) Kemampuan koperasi untuk menghimpun dan menanamkan kembali modal, dengan cara penumpukan modal anggota,
c) Penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal untuk mempertinggi efisiensi,
d) Terciptanya keterampilan teknis di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran yang tidak mungkin dapat dicapai oleh anggota secara sendiri-sendiri,
e) Pembebanan resiko dari anggota kepada koperasi sebagai satu unit usaha, yang selanjutnya kembali ditanggung secara bersama oleh anggotanya,
f) Pengaruh dari koperasi terhadap anggota yang berkaitan dengan perubahan sikap dan perilaku yang lebih sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan, diantaranya perubahan teknologi, pasar dan dinamika masyarakat.
g) Hubungan dan pola kerjasama koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya haruslah serasi. Sifat hubungan tersebut haruslah saling menguntungkan dan tidak menimbulkan ketergantungan koperasi kepada bangun ekonomi yang lain, serta dilandasi oleh

pola kerjasama antar koperasi sendiri secara horizontal dan vertikal. Pembangunan kerja sama dengan pelaku ekonomi lainnya diprioritaskan pada pengembangan hubungan dengan pengusaha menengah dan perusahaan besar milik negara.

h) Peningkatan daya guna dan hasil guna sarana dan sistem administrasi koperasi secara terpadu melalui peningkatan profesionalisme, idealisme dan dinamika organisasi dengan memanfaatkan sumber daya lembaga pembina koperasi secara optimal. Upaya ini terutama ditujukan guna mendukung proses konsolidasi Gerakan Koperasi.

Dengan kedudukan dan peranan koperasi yang demikian dan sesuai dengan kebijaksanaan program pembangunan koperasi yang dititik beratkan pada upaya memandirikan koperasi, reposisi peran koperasi pada hakikatnya ditujukan menyelaraskan peran koperasi, sesuai dengan ide dan prinsip dasarnya. Di samping untuk mengembalikan tujuan pembangunan koperasi, reposisi koperasi diprogramkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi koperasi.

Sebagai pedoman dasar dan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan koperasi, maka diperlukan adanya Konsep Dasar Reposisi Peran Koperasi yang diaplikasikan dalam bentuk ”Pola Dasar Pengembangan Peran Koperasi”. Pola dasar tersebut memuat tujuan, pendekatan, manfaat dan sasaran reposisi peran koperasi. Pedoman dasar dan arah pengembangan koperasi ini baru akan bermanfaat jika dilaksanakan secara konsisten dan bersungguh-sungguh. Di samping itu, partisipasi aktif para pengusaha kecil yang anggota koperasi, juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan koperasi. Karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi mereka perlu dikembangkan secara terus menerus, melalui pembuktian kongkrit manfaat koperasi dan tidak hanya melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan yang lebih bersifat normatif.

Sejalan dengan pengembangan eksistensi koperasi, dalam kondisi krisis ekonomi, globalisasi ekonomi dunia sekarang ini, upaya untuk

mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan koperasi adalah sangat penting. Keikutsertaan warga masyarakat sebagai pelaku ekonomi tersebut diperlukan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran makro pembangunan ekonomi yaitu penyembuhan ekonomi nasional. Hal tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa pembangunan koperasi tidak dapat lagi hanya disandarkan pada pendanaan dari pemerintah, terlebih lagi dengan kondisi keuangan pemerintah sekarang ini yang semakin menyempit.

b. Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)

Dalam rangka menanggulangi permasalahan di Bidang UKM, berbagai upaya/solusi telah dilakukan, yaitu:

a) Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor berusaha menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bogor, sehingga mampu membentuk suasana usaha yang tenteram dan aman dalam berusaha. Hal konkrit yang mungkin dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor sebagai contoh penyederhanaan perijinan usaha, keringanan pajak bagi UMKM, dan lain-lain yang berpihak pada sektor UMKM.

b) Kesinambungan Program Permodalan

Program-program yang telah digulirkan perlu untuk dilanjutkan secara konsisten dengan terus menerus dilakukan penyempurnaan dan kajian secara lebih komprehensif. Sehingga perlu diupayakan suatu unit khusus yang dibentuk untuk mencatat database UMKM yang telah diberikan fasilitas permodalan oleh perbankan dengan pencatatan tingkat keberhasilan dari masing-masing UMKM tersebut.

c) Penciptaan Undang-undang Proteksi

Dimaksudkan agar usaha yang besar tidak membunuh usaha yang kecil. Mungkin terlepas dari pengamatan kita bahwa seringkali pendirian waralaba pada suatu daerah terkesan amat rapat bahkan hampir disetiap nama suatu jalan disatu daerah

telah berdiri suatu grup waralaba tertentu. Hal ini tentunya telah membuat rontok banyak usaha yang telah dirintis oleh pengusaha kecil, keberadaan suatu bisnis yang menjual kebutuhan yang sama dengan usaha mereka sudah tentu menjadi ancaman yang besar, terlebih lagi dari sisi harga tidak kompetitif apabila berhadapan dengan usaha yang lebih besar.

d) Pengembangan Kemitraan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memfasilitasi atau mengawinkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar baik didalam maupun diluar negeri.

e) Menciptakan atau Mengikuti Pelatihan

Terkait dengan permasalahan mendasar UMKM yakni sumberdaya manusia perlu kiranya pelaku usaha mengikuti secara aktif program pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta atau dengan cara menciptakan pelatihan-pelatihan dengan bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Sehingga berbagai macam kesulitan seperti; bagaimana mengelola finansial berikut pencatatannya, teknis-teknis yang berhubungan dengan usaha, dan lain-lainnya dapat diatasi.

f) Membentuk/memperkuat Asosiasi

Kumpulan pengusaha kecil sejenis yang membentuk asosiasi diharapkan mampu saling membina, menghindarkan dari persaingan yang tidak sehat serta mempunyai bargain position yang kuat terhadap usahanya

Selain dari hasil analisis di atas terdapat pula isu-isu penting lainnya yaitu :

1) Besarnya potensi Koperasi, UKM yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi;
2) Masih adanya Koperasi yang tidak aktif.
3) Adanya permintaan produk-produk unggulan yang cukup tinggi;
4) Adanya peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan (insentif) bagi pengusaha;
5) Adanya akses kemudahan Perbankan bagi pelaku UMKM;
6) Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan KoperasI, UKM;
7) Adanya keanekaragaman produk UKM yang tersebar;
8) Banyaknya usaha mikro, Kecil, Menengah dan besar berpartisipasi dalam pembangunan.
9) Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain;
10) Adanya pasar global, yang membuat persaingan semakin tajam;
11) Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global ;
12) Rendahnya Mutu Produksi UMKM atau Standar mutu produk masih sangat labil;
13) Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor dan penggunaan bahan baku dalam negeri yang masih rendah.

Didasari isu-isu tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bogor dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan potensi bidang Koperasi, UKM untuk menangkap peluang pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri;
2) Meningkatkan Produktivitas pelaku Koperasi, UMKM;
3) Mensosialisasikan kepada seluruh lapisan sosial masyarakat bahwa sektor informal dan formal pada bidang Koperasi, UMKM, dapat menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat, sehingga menarik pemodal untuk berinvestasi pada bidang ini.
4) Meningkatkan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM;
5) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung dalam mengembangkan Koperasi, UKM;

6) Meningkatkan kapasitas/kompetensi Sumber daya pelaku Koperasi, UMKM dalam mendukung keanekaragaman produk;
7) Meningkatkan Kerjasama dengan Industri/usaha besar dalam mengembangkan Koperasi, UMKM;
8) Meningkatkan Koordinasi Lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain ;
9) Meningkatkan mutu produk UKM sehingga mampu bersaing dalam era pasar global;
10) Mengembangkan potensi UMKM dengan mempersiapkan SDM yang handal untuk menghadapi pasar global;
11) Meningkatkan Teknik Produksi pelaku UMKM;
12) Memotivasi pelaku UMKM untuk meningkatkan mutu dan produksinya dalam menggunakan substitusi bahan baku impor.

Tabel 2.3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2023

Visi: Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	 Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
	Misi 2: Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah			
1	Program Kelembagaan dan Pengawasan	Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi	Lemahnya koordinasi dengan lintas PD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain	Besarnya potensi Koperasi, UKM yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi
		Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk meningkatkan jumlah simpanan pokok dan wajib	Adanya pasar global, yang membuat persaingan semakin tajam	Adanya permintaan produk-produk unggulan yang cukup tinggi

Visi: Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	 Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
2	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Kurangnya kewirausahaan pengurus koperasi dalam meningkatkan volume usaha	Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global	Adanya peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan (insentif) bagi pengusaha
		Masih rendahnya kualitas SDM pengurus koperasi	Rendahnya Mutu Produksi UMKM atau Standar mutu produk masih sangat labil	Adanya akses kemudahan Perbankan bagi pelaku Koperasi/UMKM
3	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro	Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor dan penggunaan bahan baku dalam negeri yang masih rendah	Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan KoperasI, UKM
		Kurangnya akses permodalan usaha mikro		Adanya keanekaragaman produk UKM yang tersebar
		Kurangnya Akses Pemasaran produk UMKM		Banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah berpartisipasi dalam pembangunan
		Kesadaran berkoperasi rendah		

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan keseuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

1). Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
2). Adanya Peraturan Perundangan yang berlaku lingkup Koperasi, UMKM;
3). Adanya motivasi dan komitmen sumber daya aparatur Koperasi, UKMyang cukup tinggi;
4). Tersedianya anggaran untuk kegiatan pembangunan bidang Koperasi, UKM yang diberikan oleh Kepala Daerah.

KELEMAHAN (W):

1). Lemahnya kemampuan/kompetensi sumber daya manusia aparatur Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ;
2). Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kepada aparatur ;
3). Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur maupun sarana prasarana yang tersedia ;
4). Tersebar dan belum teridentifikasinya potensi Koperasi / Usaha Mikro sehingga menyulitkan pengembangannya ;
5). Kurangnya sarana prasarana penunjang kantor ;
6). Kurangnya Sumber Daya Aparatur sesuai jenis pendidikan.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

2). Besarnya potensi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi;
3). Adanya permintaan produk-produk unggulan yang cukup tinggi;
4). Adanya peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan (insentif) bagi pengusaha;

5). Adanya akses kemudahan Perbankan bagi pelaku Koperasi/Usaha Mikro;
6). Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
7). Adanya keanekaragaman produk UKM yang tersebar;
8). Banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah berpartisipasi dalam pembangunan.

ANCAMAN (T):

1). Lemahnya koordinasi dengan lintas PD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain ;
2). Adanya pasar global, yang membuat persaingan semakin tajam ;
3). Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global ;
4). Rendahnya Mutu Produksi UMKM atau Standar mutu produk masih sangat labil;
5). Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor dan penggunaan bahan baku dalam negeri yang masih rendah ;

Untuk Target SDGs Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor mempunyai Tujuan TPB Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua dengan target Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. Kemuadian Indikator keberhasilan SDGs untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor adalah Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN BOGOR

URUSAN /UNSUR : WAJIB NON PILIHAN DASAR
BIDANG URUSAN : KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wajib Non Pilihan Dasar						**Wajib Non Pilihan Dasar**						
	Koperasi UKM						**Koperasi UKM**						
I	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	Kabupaten Bogor	**Pertumbuhan Wirausaha**	**%**	**13.64**	**9,310,947,363.50**	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	Kabupaten Bogor	**Pertumbuhan Wirausaha**	**%**	**13.64**	**9,310,947,363.50**	
1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kabupaten Bogor	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	2.09	9,310,947,363	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kabupaten Bogor	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	2.09	9,310,947,363	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	0.45				Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	0.45		
			Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	3.27				Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	3.27		
			Rasio Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	5.87				Rasio Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	5.87		
			Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	15.79				Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	15.79		
1	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	4261	300,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	4261	300,000,000	
2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	765	250,000,000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	765	250,000,000	
3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	140	2,825,000,000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	140	2,825,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	1200	4,475,947,363	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	1200	4,475,947,363	
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	370	1,000,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	370	1,000,000,000	
6	Sub Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kabupaten Bogor	Jumlah Usaha Mikro yang ditiingkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	190	460,000,000	Sub Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kabupaten Bogor	Jumlah Usaha Mikro yang ditiingkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	190	460,000,000	
II	**Program Pengembangan UMKM**	Kabupaten Bogor	**Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha**	**%**	**58.94**	**7,149,214,311**	**Program Pengembangan UMKM**	Kabupaten Bogor	**Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha**	**%**	**58.94**	**7,149,214,311**	
1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Mikro Menjadi Kecil	Kabupaten Bogor	Prosentase juumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	56.21	7,149,214,311	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Mikro Menjadi Kecil	Kabupaten Bogor	Prosentase juumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	56.21	7,149,214,311	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	460	4,149,214,311	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	460	4,149,214,311	
	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	160	1,000,000,000	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	160	1,000,000,000	
	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kabupaten Bogor	Jumlah yang Difasilitasi	Orang	160	2,000,000,000	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kabupaten Bogor	Jumlah yang Difasilitasi	Orang	160	2,000,000,000	
III	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	Kabupaten Bogor	**Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin**	**%**	**9.57**	**1,362,189,036**	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	Kabupaten Bogor	**Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin**	**%**	**9.57**	**1,362,189,036**	
1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Bogor	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	8,70	1,147,189,036	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Bogor	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	8,70	1,147,189,036	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase fasilitasi penerbitan sertitikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	3.33				Persentase fasilitasi penerbitan sertitikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	3.33		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Jumlah Koperasi yang didorong dan dilakukan verifikasi untuk memiliki Izin Simpan Pinjam	Unit Usaha	20	1,147,189,036	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Jumlah Koperasi yang didorong dan dilakukan verifikasi untuk memiliki Izin Simpan Pinjam	Unit Usaha	20	1,147,189,036	
	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Bogor	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	%	100.00	215,000,000	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Bogor	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	%	100.00	215,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi simpan pinjam untuk koperasi denga wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten /kota	Kabupaten Bogor	Jumlah Koperasi yang didorong untuk membuat izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	Unit Usaha	2	215,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi simpan pinjam untuk koperasi denga wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten /kota	Kabupaten Bogor	Jumlah Koperasi yang didorong untuk membuat izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	Unit Usaha	2	215,000,000	
IV	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	Kabupaten Bogor	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**%**	**31.79**	**1,209,928,056**	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	Kabupaten Bogor	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**%**	**31.79**	**1,209,928,056**	
1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	%	20.63	1,209,928,056	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	%	20.63	1,209,928,056	
1	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Bogor	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	220	739,928,056	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Bogor	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	220	739,928,056	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	165	470,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	165	470,000,000	
V	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	Kabupaten Bogor	**Persentase Koperasi Aktif**	**%**	**45.09**	**1,012,149,508**	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	Kabupaten Bogor	**Persentase Koperasi Aktif**	**%**	**45.09**	**1,012,149,508**	
1	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	34.63	1,012,149,508	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	34.63	1,012,149,508	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	80	1,012,149,508	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	80	1,012,149,508	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VI	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	Kabupaten Bogor	**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**	**%**	**4.69**	**1,432,809,541**	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	Kabupaten Bogor	**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**	**%**	**4.69**	**1,432,809,541**	
1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah kenaggotaan dalam Daerah Kabuapten/Kota	Kabupaten Bogor	Persentase jumlah, anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	3.58	1,432,809,541	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah kenaggotaan dalam Daerah Kabuapten/Kota	Kabupaten Bogor	Persentase jumlah, anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	3.58	1,432,809,541	
			Persentase jumlah, koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	37.50				Persentase jumlah, koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	37.50		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	3.38				Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	3.38		
2	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Bogor	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	320	1,432,809,541	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Bogor	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	320	1,432,809,541	
VII	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	Kabupaten Bogor	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	**%**	**33.57**	**1,639,770,919**	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	Kabupaten Bogor	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	**%**	**33.57**	**1,639,770,919**	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	7.50	1,639,770,919	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	7.50	1,639,770,919	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	3.75				Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	3.75		
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	3.75				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	3.75		
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	4.40				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	4.40		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/ kota	%	20.63				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/ kota	%	20.63		
1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	160	1,569,770,919	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	160	1,569,770,919	
2	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	70	-	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	70	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Kabupaten Bogor	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	70	70,000,000	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Kabupaten Bogor	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	70	70,000,000	
VIII	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	Kabupaten Bogor	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**14,312,536,687**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	Kabupaten Bogor	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**14,312,536,687**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	**Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas**	%	100	**695,000,000.00**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kabupaten Bogor	**Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas**	%	100	**695,000,000.00**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	50,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	50,000,000.00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000.00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kali	1	20,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kali	1	20,000,000.00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000.00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	25,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	25,000,000.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	500,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	500,000,000.00	
8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1	40,000,000.00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1	40,000,000.00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan	Kabupaten Bogor	**Persentase realisasi anggaran perangkat daaerah**	**%**	**100**	**10,588,561,742.00**	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	Kabupaten Bogor	**Persentase realisasi anggaran perangkat daaerah**	**%**	**100**	**10,588,561,742.00**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	48	10,418,862,059	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	48	10,418,862,059	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	6,000,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	6,000,000.00	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	80,000,000.0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	80,000,000.0	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	21,599,683.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	21,599,683.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	12,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	12,000,000.00	
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	14,700,000.00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	14,700,000.00	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	22,400,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	22,400,000.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	13,000,000.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	13,000,000.00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	**Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu**	**%**	**100**	**413,543,719.00**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kabupaten Bogor	**Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu**	**%**	**100**	**413,543,719.00**	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	30,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	30,000,000.00	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	353,543,719.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	353,543,719.00	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Bogor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	30,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Bogor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	30,000,000.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	**Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum**	**%**	**100**	**1,022,768,797.00**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kabupaten Bogor	**Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum**	**%**	**100**	**1,022,768,797.00**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50,000,000.00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	353,335,380.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	353,335,380.00	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	83,843,295.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	83,843,295.00	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	102,231,112.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	102,231,112.00	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	69,865,898.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	69,865,898.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Paket	1	5,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Paket	1	5,000,000.00	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	10,506,462.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	10,506,462.00	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	318,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	318,000,000.00	
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	29,986,650.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	29,986,650.00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bogor	**Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**48,000,000.00**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Bogor	**Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**48,000,000.00**	
1	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	9	48,000,000.00	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	9	48,000,000.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	-	
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bogor	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bogor	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	-	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bogor	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**1,065,800,353.00**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kabupaten Bogor	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**1,065,800,353.00**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5,550,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5,550,000.00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	190,250,353.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	190,250,353.00	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	1	5,000,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	1	5,000,000.00	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	865,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	865,000,000.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bogor	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik**	**%**	**100**	**478,862,076.00**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kabupaten Bogor	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik**	**%**	**100**	**478,862,076.00**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	128,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	128,000,000.00	
2	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bogor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	16,650,000.00	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bogor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	16,650,000.00	
3	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Bogor	Jumlah Meubeulair yang dipelihara	Unit	7	30,000,000.00	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Bogor	Jumlah Meubeulair yang dipelihara	Unit	7	30,000,000.00	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	65	71,595,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	65	71,595,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	114,675,076.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	114,675,076.00	
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30	60,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30	60,000,000.00	
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Unit	1	57,942,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Unit	1	57,942,000.00	
						37,429,545,420.78						37,429,545,421	

Rancangan Awal RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Kabupaten Bogor Tahun 2026 disusun berdasarkan atas Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dan membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJM Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor, dengan arahan Kepala Daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor.

Dalam rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Bogor jumlah anggaran sebesar Rp. 37.429.545.421,- yang terdiri dari 8 program, 15 kegiatan dan 57 sub kegiatan selanjutnya berdasarkan hasil analisis kebutuhan pasca pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja 2026 sebesar Rp 37.429.545.421,- yang terdiri dari 8 program, 15 kegiatan dan 57 sub kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pasca pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 37.429.545.421,-. Program pada rancangan awal RKPD dan Renja masih tetap, tidak ada perubahan, akantetapi terdapat perubahan pada rincian kegiatan baik pada indikator kegiatan maupun target kinerja. Jumlah kegiatan yang berubah anggarannya sebanyak 8 program, 15 kegiatan dan 57 sub kegiatan.

Analisis kebutuhan sebagaimana diatas merupakan hasil sinkronisasi perumusan program dan kegiatan perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah untuk menajamkan usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2025, baik yang dihasilkan dari Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan maupun adapun pada tahun 2026 ada juga penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah yaitu Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis perdesaan, dan Peningkatan peluang investasi dan penciptaan peluang kerja di tahun 2026. Sehingga dalam mendukung pencapaian

kebijakan tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menetapkan 3 program prioritas, serta menetapkan 3 Kegiatan prioritas dan 11 Sub Kegiatan. Program prioritas tersebut adalah :

1) Program Pengembangan Usaha Mikro.
2) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
3) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).

Secara lengkap Review terhadap rancangan Awal RKPD tahun 2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.4, dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada Tabel 2.4.

2.5. Penelaahan Usulan Program , Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasiitasi Akses Permodalan Usaha Mikro	Kelompok UMKM Desa Pengasinan Kp. Pengasinan RT.06 RW.01, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
2	Pelatihan Digital	Wilayah Desa Situ Udik, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
3	Pelatihan Digital	jl. kh abdul hamid km7 Kp. Pasarean Rt. 01/01 desa pasarean kecamatan pamjahan kabupaten bogor, Kab. Bogor	5	6,500,000	orang	Usulan disetujui
4	Pelatihan Kewirausahaan	Kp. Kebon Kelapa, Kp. Cigoong, Kp. Jambu Manis, Kp. Babakan Saga dan Kp. Sipugur Dusun 04 wilayah Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor , Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan

5	Pelatihan Diversifikasi Usaha	Kantor Desa Bojongkulur Kp.Bojongkulur RT.001 RW.009, Kab. Bogor	2	3,800,000	orang	Dikembalikan
6	Pelatihan Digital	TEGAL WARU RT 006 RW 003, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
7	Pelatihan Digital	Kp. Sadeng Jalan RT 02/01, Kab. Bogor	5	6,500,000	orang	Usulan disetujui
8	Pelatihan Kewirausahaan	Kp. Gunung Seureuh, Kab. Bogor	2	3,800,000	Orang	Usulan disetujui
9	Pelatihan Perkoperasian	Kp. Paku RT 02/04, Kab. Bogor	10	15,000,000	orang	Usulan disetujui
10	Pelatihan Kewirausahaan	Kp. Paku RT 06/04, Kab. Bogor	2	3,800,000	Orang	Usulan disetujui
11	Pelatihan Digital	Desa Wisata Batulayang dan pelaku UMKM, Kab. Bogor	5	6,500,000	orang	Usulan disetujui
12	Pelatihan Digital	Kp. Nagrog RT 004 RW 002 (Kantor Desa Sukahati), Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Perangkat Daerah
13	Pelatihan Digital	Pemuda dan pemudi yang baru lulus Slta di Desa Gunungsari, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
14	Pelatihan Digital	Desa Sipak, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
15	Pelatihan Kewirausahaan	Kantor Desa Karang Asem Timur Rt. 002/006 Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan

16	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Sadeng, Kab. Bogor	2	3,800,000	Orang	Usulan disetujui
17	Sertifikat Halal	Desa Sadeng, Kab. Bogor	2	9,400,000	orang	Usulan disetujui
18	Sertifikasi PKP (Penyuluhan keamanan Pangan)	Desa Sadeng, Kab. Bogor	2	2,600,000	orang	Usulan disetujui
19	Sertifikasi PKP (Penyuluhan keamanan Pangan)	Desa Sadeng, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
20	Sertifikasi PKP (Penyuluhan keamanan Pangan)	Desa Sadeng, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
21	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	Desa Sadeng, Kab. Bogor	5	9,500,000	orang	Usulan disetujui
22	Pelatihan Kewirausahaan	KELURAHAN PADASUKA, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
23	Fasiitasi Akses Permodalan Usaha Mikro	Kp. Leuwibatu, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
24	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	Jalan Raya Cikaret Rt.01/01, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
25	Pelatihan Digital	Jalan Raya Cikaret Rt.01/01, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
26	Pelatihan Kewirausahaan	desa sukadamai, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan

27	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	Kp. Ciawi RT 005 RW 001 Kp. Sukahurip RT 001 RW 003 Kp. Selawangi RT 003 RW 004 Kp. Neglasari RT 001 RW 006 Kp. Cibeureum RT 003 RW 006 Kp. Catangmalang RT 005 RW 008 , Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
28	Fasiitasi Akses Permodalan Usaha Mikro	Tersebar, Desa Sukawangi, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
29	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	KP. CIMUNCANG RT. 004 RW. 005, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
30	Pelatihan Kewirausahaan	KP. RASAMALA RT. 001 RW. 002, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
31	Pelatihan Diversifikasi Usaha	KP. CIBADAK RT. 001 RW. 001, Kab. Bogor	2	3,800,000	Orang	Usulan disetujui
32	Fasiitasi Akses Permodalan Usaha Mikro	Wilayah Desa Cileungsi, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
33	Pelatihan Digital	DESA LEUWIKARET KP. GUHA TONGGOH RT. 001 RW. 010, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
34	Pelatihan Perkoperasian	kelurahan Nanggewer Mekar, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
35	Pelatihan Kewirausahaan	RW 001 s/d RW 004, Kab. Bogor	2	3,800,000	Orang	Usulan disetujui

36	Pelatihan Kewirausahaan	Kp Cibadak Balai Desa RT005 RW001, Kab. Bogor	2	3,800,000	Orang	Dikembalikan
37	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	Kp. Cibadak Balai Desa RT005 RW001, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
38	Pelatihan Digital	Desa Tarikolot, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
39	Pelatihan Digital	Kantor Bumdes Desa Sirnagalih Kp.Cimanglid Rt.03 Rw.02 Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari, Kab. Bogor	5	6,500,000	orang	Usulan disetujui
40	Pelatihan Digital	UMKM se Kelurahan, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
41	Fasiitasi Akses Permodalan Usaha Mikro	UMKM Nanggewer, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
42	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kab bogor Volume 30 Orang, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
43	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	Kp. Ciburayut, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
44	Pelatihan Digital	kantor desa ciampea, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
45	Pelatihan Kewirausahaan	Jl. Sawo Kp. Kiaralawang Rt. 05/06 , Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
46	Pelatihan Kewirausahaan	Wilayah Desa Sukamakmur, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan

47	Pelatihan Kewirausahaan	kp. parigi rt. 004/002, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
48	Pelatihan Digital	AMANAH ASRI RT 01 DAN RT 02 RW 13, Kab. Bogor	-	-	-	Dibatalkan
49	Pelatihan Kewirausahaan	KP SAWAH BARU RT 03 RW 12, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
50	Pelatihan Kewirausahaan	Kp. Kiaralawang, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
51	Pelatihan Diversifikasi Usaha	Jl. Sirna Urip Kp. Kopo RT 002 RW 002 , Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
52	Pelatihan Kewirausahaan	Jl. Sirna Urip Kp. Kopo RT 002 RW 002, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
53	Pelatihan Digital	Karang Taruna Desa Jampang Jalan Raya Parung Bogor No. 01 Rt. 002 Rw. 002, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
54	Pelatihan Digital	Jl. Sirna Urip Kp. Kopo RT 002 RW 002, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
55	Fasiitasi Akses Permodalan Usaha Mikro	Jl. Sirna Urip Kp. Kopo RT 002 RW 002, Kab. Bogor	5	6,500,000	orang	Usulan disetujui
56	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	Tmn. Pagelaran Rw.12, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
57	Pelatihan Kewirausahaan	Tmn. Pagelaran Rw.12, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
58	Fasiitasi Akses Permodalan Usaha Mikro	Tmn. pagelaran Rw.12, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan

59	Fasiitasi Akses Permodalan Usaha Mikro	Desa Jampang, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
60	Fasilitasi PKPss (Penyuluhan keamanan Pangan Siap Saji)	Desa Pabuaran, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
61	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Pabuaran, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
62	Pelatihan Digital	Desa Pabuaran, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
63	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	Desa Pabuaran, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
64	Sertifikasi PKP (Penyuluhan keamanan Pangan)	Desa Kalisuren, Kab. Bogor	2	2,600,000	orang	Usulan disetujui
65	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	Desa Kalisuren, Kab. Bogor	5	9,500,000	orang	Usulan disetujui
66	Sertifikat Halal	Desa Kalisuren, Kab. Bogor	2	9,400,000	orang	Usulan disetujui
67	Pelatihan Digital	Desa Kalisuren, Kab. Bogor	5	6,500,000	orang	Usulan disetujui
68	Fasilitasi PKPss (Penyuluhan keamanan Pangan Siap Saji)	Desa Kalisuren, Kab. Bogor	2	2,600,000	orang	Usulan disetujui
69	Pelatihan Diversifikasi Usaha	Desa, Kab. Bogor	2	3,800,000	Orang	Usulan disetujui
70	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Kalisuren, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
71	Fasiitasi Akses Permodalan Usaha Mikro	Desa Kalisuren, Kab. Bogor	5	6,500,000	orang	Usulan disetujui
72	Pelatihan Perkoperasian	Desa Kalisuren, Kab. Bogor	5	12,000,000	orang	Usulan disetujui
73	Pelatihan Digital	Jl. Letnan Sukarna RT. 006 RW. 001, Kab. Bogor	5	6,500,000	orang	Usulan disetujui

74	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	kp.Pos Rt.002 Rw.005 desa leuweungkolot kec. cibungbulang Kab.Bogor, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
75	Pelatihan Digital	Kp. Laladon RT. 001 RW. 003, Kab. Bogor	5	6,500,000	orang	Usulan disetujui
76	Sertifikasi PKP (Penyuluhan keamanan Pangan)	Kp. Serena Tonggoh RT.004/002, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
77	Pelatihan Digital	Kp. Ciapus RT. 005 RW. 002, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
78	Pelatihan Diversifikasi Usaha	Kp. Pondok Bitung rt. 002/002, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
79	Fasiitasi Akses Permodalan Usaha Mikro	KP. CEMPLANG RW 006, Kab. Bogor	5	6,500,000	orang	Usulan disetujui
80	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	RT.002 RW.005 Kelurahan Atang Senjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, Kab. Bogor	5	9,500,000	orang	Usulan disetujui
81	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	Kp. Gunung Batu 2 Rt. 01/09, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
82	Fasilitasi PKPss (Penyuluhan keamanan Pangan Siap Saji)	Desa Sukaresmi, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
83	Fasilitasi PKPss (Penyuluhan keamanan Pangan Siap Saji)	Kp. Gunung Batu 2 Rt. 01/09, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
84	Pelatihan Digital	Kp. Gunung Batu 2 Rt. 01/09, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
85	Pelatihan Digital	Desa Sukaresmi, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
86	Pelatihan Kewirausahaan	Kp. Gunung Batu 2 Rt. 01/09, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan

87	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	Desa Sukaresmi, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
88	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Sukaresmi, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
89	Pelatihan Digital	Kp. Cibanteng RT. 004 RW. 003, Kab. Bogor	5	6,500,000	orang	Usulan disetujui
90	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	Wilayah Desa Sukamakmur, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
91	Pelatihan Digital	Wilayah Desa Sukamakmur, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
92	Fasilitasi PKPss (Penyuluhan keamanan Pangan Siap Saji)	Wilayah Desa Sukamakmur, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
93	Pelatihan Kewirausahaan	Kantor Desa Wanaherang Jl. Melati No.15 Kp. Baru RT 001 RW 008 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Kab. Bogor	2	3,800,000	Orang	Usulan disetujui
94	Fasilitasi PKPss (Penyuluhan keamanan Pangan Siap Saji)	Desa Sukamulya Kecamatan Sukamakmur, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
95	Pelatihan Digital	Desa Sukamulya Kecamatan Sukamakmur, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
96	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	Desa Sukamulya Sukamakmur, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan

97	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Sukamulya Kecamatan Sukamakmur, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
98	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	UMKM Pondok Rajeg, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
99	Fasilitasi PKPss (Penyuluhan keamanan Pangan Siap Saji)	Tersebar, Desa Sukawangi, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
100	Pelatihan Kewirausahaan	Tersebar di Desa Sukawangi, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
101	Sertifikasi PKP (Penyuluhan keamanan Pangan)	jl cendrawasih rw 05 desa tajurhalang, Kab. Bogor	-	-	-	Dibatalkan
102	Sertifikat Halal	jl cendrawasih RW 05 desa tajurhalang, Kab. Bogor	-	-	-	Dibatalkan
103	Pelatihan Digital	Tersebar di Desa Sukawangi, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
104	Sertifikat Halal	Kp. Bojong Jaya RT 001/003, Kab. Bogor	5	17,500,000	Unit Usaha	Usulan disetujui
105	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	Ciomas Rahayu, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
106	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Cibeuteung Udik, Kab. Bogor	-	-	-	Dibatalkan
107	Fasiitasi Akses Permodalan Usaha Mikro	Desa Pasir Mukti, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Perangkat Daerah
108	Pelatihan Kewirausahaan	jl cendrawasih rw 05, Kab. Bogor	-	-	-	Dibatalkan
109	Pelatihan Perkoperasian	jl cendrawasih rw 05, Kab. Bogor	-	-	-	Dibatalkan

110	Pelatihan Digital	jl cendrawasih RW 05, Kab. Bogor	-	-	-	Dibatalkan
111	Fasiitasi Akses Permodalan Usaha Mikro	jl cendrawasih RW 05, Kab. Bogor	-	-	-	Dibatalkan
112	Pelatihan Diversifikasi Usaha	jl cendrawasih RW 05, Kab. Bogor	-	-	-	Dibatalkan
113	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	jl cendrawasih RW 05, Kab. Bogor	-	-	-	Dibatalkan
114	Sertifikasi PKP (Penyuluhan keamanan Pangan)	Jl.H.Nunung M Sa'i no.1 Desa Tonjong, Kab. Bogor	2	2,600,000	orang	Usulan disetujui
115	Sertifikat Halal	Jl.H.Nunung M Sa'i no.1 Desa Tonjong, Kab. Bogor	2	9,400,000	orang	Usulan disetujui
116	Pelatihan Digital	Jl.H.Nunung M Sa'i no.1 Desa Tonjong, Kab. Bogor	5	6,500,000	orang	Usulan disetujui
117	Fasilitasi PKPss (Penyuluhan keamanan Pangan Siap Saji)	Jl.H.Nunung M Sa'i no.1 Desa Tonjong, Kab. Bogor	2	2,600,000	orang	Usulan disetujui
118	Pelatihan Diversifikasi Usaha	Jl.H.Nunung M Sa'i no.1 Desa Tonjong, Kab. Bogor	2	3,800,000	Orang	Usulan disetujui
119	Pelatihan Digital	Desa Tangkil Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Perangkat Daerah
120	Pelatihan Diversifikasi Usaha	KP. CARANG PULANG RT.004/003, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
121	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	Desa Sirnajaya, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
122	Sertifikasi PKP (Penyuluhan keamanan Pangan)	UMKM Desa Sukmajaya, Kab.	2	2,600,000	orang	Usulan disetujui

		Bogor				
123	Pelatihan Digital	Sibat Kelurahan Sukahati, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Kecamatan
124	Pelatihan Digital	Desa Sadeng RW 03, Kab. Bogor	5	6,500,000	orang	Usulan disetujui
125	Pelatihan Kewirausahaan	desa banjarwaru, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
126	Pelatihan Digital	Desa Cijayanti, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
127	Sertifikat Halal	umkm desa sukmajaya, Kab. Bogor	2	9,400,000	orang	Usulan disetujui
128	Fasiitasi Akses Permodalan Usaha Mikro	Jl.H.Nunung M Sa'i no.1 Desa Tonjong, Kab. Bogor	5	6,500,000	orang	Usulan disetujui
129	Pelatihan Perkoperasian	Jl.H.Nunung M Sa'i no.1 Desa Tonjong, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
130	Pelatihan Diversifikasi Usaha	umkm desa sukmajaya, Kab. Bogor	2	3,800,000	Orang	Usulan disetujui
131	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Sukmajaya, Kab. Bogor	2	3,800,000	Orang	Usulan disetujui
132	Fasilitasi PKPss (Penyuluhan keamanan Pangan Siap Saji)	kp. cibadak balai desa RT005 RW001, Kab. Bogor	2	2,600,000	orang	Usulan disetujui
133	Pelatihan Digital	Kantor Desa Leuwinutug RT.001 RW.004 Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Kab. Bogor	-	-	-	Verifikasi Perangkat Daerah
134	Fasilitasi PKPss (Penyuluhan keamanan Pangan Siap Saji)	Desa Wargajaya, Kab. Bogor	2	2,600,000	orang	Usulan disetujui

135	Pelatihan Digital	Desa Wargajaya, Kab. Bogor	5	6,500,000	orang	Usulan disetujui
136	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro	Desa wargajaya, Kab. Bogor	5	9,500,000	orang	Usulan disetujui
137	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Wargajaya, Kab. Bogor	2	3,800,000	Orang	Usulan disetujui
138	Pelatihan Kewirausahaan	karadenan, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
139	Pelatihan Digital	karadenan, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
140	Pelatihan Digital	Desa Bantarsari Kecamatan Ranca bungur Kabupaten Bogor, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
141	Pelatihan Kewirausahaan	Kp. Cibeureum Tengah Rt 006 Rw 002, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
142	#HB Hibah stimulan kepada lembaga / organisasi pendukung peningkatan kinerja dan kualitas kelembagaan koperasi	Sukaharja, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan
143	#HB Hibah stimulan kepada lembaga / organisasi pendukung peningkatan kinerja dan kualitas kelembagaan koperasi	Kp. Paringga RT. 05 RW. 03 Desa Neglasari Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Kab. Bogor	1	1,843,780,000	kegiatan	Usulan disetujui
144	#HB Hibah stimulan kepada lembaga / organisasi pendukung peningkatan kinerja usaha mikro	jl pesona no.123 Rt.002/008 kelurahan harapan jaya, kecamatan cibinong kabupaten bogor, 16914, Kab. Bogor	-	-	-	Dikembalikan

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Bogor. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyrakat yang mengusulkan melalui Musrembang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, sampai dengan tingkat Kabupaten Bogor, atau berdasarkan proposal program/kegiatan yang masuk ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Bogor.

Usulan program/kegiatan tersebut diinventarisasi dan dinilai antara kesesuaiannya berdasarkan nomenklatur baku yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan informasi usulan program/kegiatan yaitu jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan. Hasil inventarisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Bogor selanjutnya akan dipilah lagi berdasarkan prioritas, fokus kebijakan tahun 2026, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ingin dicapai, dan implikasi terhadap capaian renstra SKPD maupun terhadap RPD Perubahan Kabupaten Bogor. Secara lengkap usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.5.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia

Penyusunan Renstra Dinas KUK 2024-2026 harus memperhatikan Renstra kementerian/lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas KUK selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sebagai acuan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Tahun 2019-2024.

Tabel 3.2

Telaah terhadap Sasaran Renstra Kementerian KUKM RI

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR		TARGET
		PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
1	Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	7%
		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	7%
2	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Meningkatnya Usaha Mikro Yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	4%
		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	4%
		Pertumbuhan Wirausaha	Pertumbuhan Wirausaha	4%

Sumber: Permendagri 81/2022 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Tabel 3.3.1
Telaah Renstra K/L

No	Renstra K/L	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata-rata/tahun 7,5 – 10,0%)	Tupoksi : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dibidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih rendahnya kontribusi kegiatan usaha koperasi dalam peningklatan PDRB	Pembinaan Koperasi dan UKM yang kurang terfokus
2	Jumlah UMKM dan koperasi yang telah menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk (kumulatif selama 5 tahun sebanyak 50.000 unit)	Perumusan Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih perlu ditingkatkannya Usaha Mikro sebagai penggerak ekonomi	Sanksi yang belum optimal
3	Pertumbuhan produktivitas UMKM (rata-rata/tahun sebesar 5,0 – 7,0%)	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih kurangnya Wirausaha baru yang layak dan inovatif	Tupoksi Dinas yang masih belum Sinkron
4	Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun sebesar 5,0 – 7,0%)	Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih kurangnya minat generasi muda terhadap kewirausahaan	SDM kurang terhadap pemahaman koperasi dan UKM secara utuh
5	Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukkan PDB (rata-	Pelaksanaan Administrasi Dinas		

No	Renstra K/L	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	rata/tahun 6,5 – 7,5%)			
6	Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun sebesar 4,0 – 5,5%)	Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Bidang Tugasnya		
7	Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019 sebesar 55,0%)			
8	Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019 sebanyak 25,0%)			
9	Pertambahan jumlah wirausaha baru-melalui program pusat dan daerah (kumulatif selama 5 tahun sebanyak 1 juta unit)			

Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Barat

Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik lokal, regional, nasional dan global sudah seharusnya dapat direspon dengan menempatkan perencanaan sebagai alat manajerial yang berfungsi untuk kontrol dalam mencapai sasaran. Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 bertujuan memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka untuk mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan tiga tahun ke depan sesuai RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas KUK sebagai koordinator perencanaan pembangunan selain menghadapi tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, juga menghadapi permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

Tabel. 3.3.2 Permasalahan Dinas Koperasi Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat

MASALAH POKOK	MASALAH		AKAR MASALAH
BELUM OPTIMALNYA KUALITAS KOPERASI	RENDAHNYA KAPASITAS SDM KOPERASI	1	RENDAHNYA KUALITAS SDM KOPERASI MENGAKSES ICT DAN JARINGAN PEMASARAN
		2	MASIH BANYAK ANGGOTA KOPERASI TIDAK PAHAM KOPERASI
		3	KURANGNYA JANGKAUAN PENYULUHAN DAN DIKLAT PERKOPERASIAN
	MASIH RENDAHNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	1	MASIH BANYAK KOPERASI TIDAK AKTIF
		2	MASIH BANYAK KOPERASI YANG BELUM MENERAPKAN PRINSIP DAN NILAI KOPERASI
		3	MASIH BANYAKNYA KOPERASI YANG BERGANTUNG PADA BANTUAN PEMERINTAH

MASALAH POKOK	MASALAH		AKAR MASALAH
	RENDAHNYA KUALITAS USAHA KOPERASI	1	KURANGNYA KAPASITAS KOPERASI UNTUK BERINOVASI DALAM PENGEMBANGAN DAN LAYANAN BAGI ANGGOTA
		2	KURANGNYA KESADARAN ANGGOTA KOPERASI UNTUK BERPARTISIPASI DALAM MENINGKATKAN MODAL KOPERASI DAN MEMAJUKAN USAHA KOPERASI
		3	TERBATASNYA JARINGAN USAHA DAN PEMASARAN KOPERASI UNTUK MENJANGKAU PASAR TERUTAMA DALAM PROMOSI PRODUK, AKSES INFORMASI PASAR DAN SALURAN PEMASARAN
BELUM OPTIMALNYA DAYA SAING PRODUK UKM	RENDAHNYA PEMASARAN PRODUK UKM	1	BELUM OPTIMAL PEMANFATAAN ICT DALAM PEMASARAN PRODUK UKM
		2	RENDAHNYA MANAJEMEN PEMASARAN
		3	TERBATASNYA JEJARING PEMASARAN
	BELUM MAKSIMAL PEMANFATAN TEKNOLOGI OLEH UKM	1	BELUM OPTIMALNYA BRANDING DAN KEMASAN PRODUK UKM
	RENDAHNYA PRODUKTIVITAS UKM	1	KUALITAS PRODUKSI RENDAH
		2	DIVERSIVIKASI PRODUK UKM RENDAH
		3	MANAJEMEN PRODUKSI MASIH RENDAH
	AKSES PEMBAIAYAAN UKM	1	AKSES PEMBIAYAAN MASIH TERBATAS
	MASIH RENDAHNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN UKM	1	RENDAHNYA KAPASITAS SDM UKM
		2	MASIH RENDAHNYA LEGALITAS USAHA UKM

Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Barat mengacu kepada Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro Kecil dan menengah. Isu strategis pemberdayaan KUMKM merupakan permasalahan yang akan diselesaikan 3 (tiga) tahun kedepan (tahun 2024-2026) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2013-2018), dan perlu penyelesaian secara bertahap. Permasalahan utama pemberdayaan KUMKM, meliputi antara lain:

1. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi;
2. Rendahnya kelembagaan, SDM, akses pembiayaan dan akses pasar dan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Kurangnya kepatuhan pada peraturan perundangan Koperasi dan UKM yang berlaku.

Kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Kecil diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan misi keempat Pemerintah Provinsi Jawa

Barat yaitu “Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Ummat yang Sejahtera dan Adil“ dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal;
2. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan.
3. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam mengakses pemasaran dan operasional bisnis Koperasi.
4. Penciptaan peluang pemasaran produk UMKM.
5. Penumbuhan kewirausahaan

Dari kelima sasaran tersebut, maka diperlukan strategi meningkatkan daya saing usaha koperasi dan usaha Kecil dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan dukungan pembiayaan (Kredit) usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil l.
2. Peningkatan akses pasar (*Off Taker* & Promosi), teknologi dan kualitas produk bagi Koperasi dan Usaha Kecil l
3. Pendukungan wirausaha.

Tabel 3.3.3
Telaah Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Jawa Barat

No	Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Mewujudkan Koperasi Dan Usaha Kecil Yang Berdaya Saing Dan Berkontribusi Pada Perekonomian Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat	Tupoksi : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dibidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih rendahnya kontribusi kegiatan usaha koperasi dalam peningklatan PDRB	Pembinaan Koperasi dan UKM yang kurang terfokus
		Perumusan Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih perlu ditingkatkannya Usaha Mikro sebagai penggerak ekonomi	Sanksi yang belum optimal
		Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih kurangnya Wirausaha baru yang layak dan inovatif	Tupoksi Dinas yang masih belum Sinkron
		Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih kurangnya minat generasi muda terhadap kewirausahaan	SDM kurang terhadap pemahaman koperasi dan UKM secara utuh
		Pelaksanaan Administrasi Dinas		

TABEL 3.1
KETERKAITAN PROGRAM DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1		2	3	4	5	6	7
		-					
1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggung dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	13.64	%	4,255,000,000
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya level usaha mikro	Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan menjadi wirausaha	58.94	%	2,100,000,000
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Kualiats Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizinAktif	9.57	%	740,000,556
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	31.79	%	820,000,000
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	45.09	%	450,000,000
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	4.69	%	650,000,000
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	33.57	%	815,000,000
		-					**9,830,000,556**

TABEL 3.2
KETERKAITAN PROGRAM DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT TAHUN 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggung dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	13.64	%	4,255,000,000
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya level usaha mikro	Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan menjadi wirausaha	58.94	%	2,100,000,000
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Kualiats Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizinAktif	9.57	%	740,000,556
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	31.79	%	820,000,000
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	45.09	%	450,000,000
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	4.69	%	650,000,000
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	33.57	%	815,000,000
		-					**9,830,000,556**

TABEL 3.3
DUKUNGAN TERHADAP ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	BIDANG/SEKSI/SUBID/UPT PENGAMPU
1	2	3
Meningkatnya produktivitas UMKM dan koperasi	Pemberdayaan, Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Koperasi;	Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, Sub Koordinator Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Pengembangan Perluasan Akses Pembiayaan/Permodalan Bagi Koperasi dan Pengembangan Akses Pasar Bagi Produk Koperasi Di Dalam Dan Luar Negeri	Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, Sub Koordinator Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Restrukturisasi Usaha dan Perlindungan Koperasi	Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, Sub Koordinator Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Pengembangan, penguatan dan peningkatan usaha mikro menjadi usaha Kecil	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro , Sub Koordinator Pengembangan Usaha Mikro
	Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas produksi dan pengolahan	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro , Sub Koordinator Pengembangan Usaha Mikro
	Fasilitasi pengembangan dan promosi akses pasar produk usaha mikro di dalam dan luar negeri	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro , Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Mikroo

3.2. Tujuan, dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bogor tahun 2026 adalah berdasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Renstra Dinas, serta mengikuti alur yang sudah baku seperti terlihat pada Gambar 3.2.

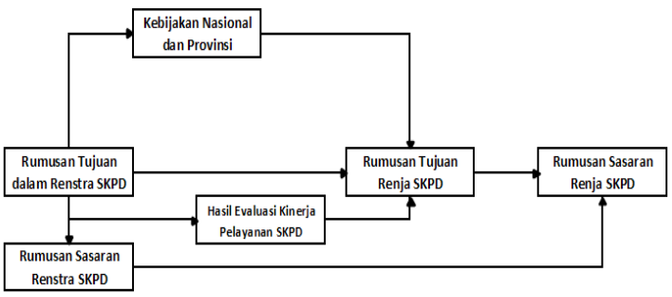

Gambar 3.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1) Meningkatnya produktivitas koperasi dan Usaha Mikro.

Sasaran :

1) Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi.
2) 'Meningkatnya Volume Penjualan Produk Usaha Mikro.

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bogor berpedoman pada dokumen Rancangan RKPD Tahun 2026 yang mengacu pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024 – 2026. Sehubungan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan pada tahun 2026, maka proses penyusunan berada dalam masa transisi, artinya RPD Perubahan Tahun 2024-2026 yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sedang dalam proses penyusunan, karena adanya RPD untuk Periode Tahun 2024-2026 baru dilaksanakan pada akhir Tahun 2026 maka RPD Perubahan Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 berdasarkan penjabaran visi dan misi yang diusung masih dalam proses penyusunan. Untuk itu, penyusunan rencana kerja berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 bahwa tahun 2026 merupakan tahun pertama RPD, yang ditujukan untuk optimalisasi pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan

pemerintahan dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prioritas pada tahap RPD Daerah keempat (2024-2026) untuk urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diprioritaskan untuk Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing. Dalam jangka panjang diharapkan seluruh Koperasi dan Usaha Mikro mendapatkan produk yang berdaya saing penuh sehingga dapat diterima pasar secara keseluruhan. Faktor kunci untuk itu adalah meningkatnya adalah daya saing produk.

Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat juga RPJPD Kabupaten Bogor 2005-2025, telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2026, tujuan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2026 selaras dengan tujuan RPJMD Bupati Bogor, adapun sasaran Renja tahun 2026 adalah:

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi.
2. 'Meningkatnya Volume Penjualan Produk Usaha Mikro.

Indikator kinerja yang akan menjadi target kinerja perencanaan Tahun 2026 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

1. Prosentase pertumbuhan Volume Usaha Koperasi .
2. Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro.
3. Prosentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT.
4. Volume Penjualan Produk Usaha Mikro.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sedangkan Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor adalah Meningkatnya produktivitas koperasi dan Usaha Mikro.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor mempunyai 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi.
2. Meningkatnya Volume Penjualan Produk Usaha Mikro.

Indikator Sasaran terdiri dari 5 buah yaitu:

1. Prosentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT.
2. Volume Penjualan Produk Usaha Mikro.

TABEL 3.4
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
	1	2	3	4	
TUJUAN		**TUJUAN**			
Meningkatnya kesempatan berusaha bagi masyarakat	Meningkatnya kesempatan berusaha bagi masyarakat	Pendapatan Perkapita Masyarakat	Rumus : Pendapatan perkapita tahun berkenaan (BPS)	61.36-62.33	Rp/Tahun
SASARAN		**SASARAN**			
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Prosentase pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Rumus : ((jml vol usaha thn n - (n-1)) / jmlh volume usaha thn n-1)*100%	0.77	%
Meningkatnya volume penjualan produk usaha mikro	Meningkatnya volume penjualan produk usaha mikro	Persentase laju Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	Rumus: Jumlah omset tahun ke-n dikurangi omset tahun ke n-1 ---------- x 100% Jumlah omset tahun n-1	2.26	%

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor untuk tahun 2026 telah merencanakan program dan kegiatan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1) Kegiatan yang menyangkut dalam peningkatan kekuatan kelembagaan, yaitu :
   a) Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan;
   b) Penguatan teknologi informasi dan sebaran informasi sebagai dasar dalam kegiatan pembangunan bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menangah;
   c) Peningkatan kesejahteraan pegawai.
2) Kegiatan yang menyangkut dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia Koperasi UMKM yaitu :
   a) Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam rangka optimalisasi pelayanan publik;
   b) Peningkatan kemampuan sumber daya pelaku usaha Koperasi, UKM khususnya pengusaha atau pengrajin usaha Kecil menengah;
   c) Pengenalan teknologi produksi kepada pengusaha atau pengrajin UKM/IKM.
3) Kegiatan yang menyangkut dalam peningkatan penumbuhan dan pengembangan usaha bidang Koperasi UKM yaitu :
   a) Pelatihan dan pengenalan metode atau teknik produksi yang lebih effisien dan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk kepada pelaku usaha Koperasi UKM dimana daerahnya memiliki potensi potensi sumber daya yang sangat banyak (bahan baku produksi melimpah);
   b) Pelatihan kepada masyarakat yang berminat dan ingin melaksanakan usahanya di bidang Koperasi UMKM.
   c) Fasilitasi permodalan dengan perbankkan dan lembaga keuangan lainnya;
   d) Fasilitasi kemitraan dengan pihak atau pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang telah maju dalam usahanya.
4) Kegiatan yang menyangkut dalam peningkatan promosi dan pemasaran produk/komoditi unggulan kabupaten bogor, yaitu :
   a) Peningkatan promosi dengan melaksanakan pameran baik di dalam maupun luar negeri;
   b) Peningkatan promosi dengan memadukan dengan teknologi informasi seperti internet dan sistem informasi yang ada;

c) Peningkatan analisis pasar dalam dan luar negeri;
d) Penyebaran informasi produk/komoditi unggulan, dan penyebaran informasi pasar kepada pelaku usaha Koperasi UMKM.

Dengan melihat hasil analisis kebutuhan, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026 direncanakan terdiri atas 8 program dan 15 kegiatan 57 sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. Usulan program dan kegiatan yang diajukan sebesar Rp. 37.429.545.421,- dengan sumber dana APBD Kabupaten Bogor

Hasil yang diharapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor yaitu dapat terealisasikannya tujuan dan sasaran, serta kebijakan dan prioritas pembangunan bidang koperasi UMKM di Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor tahun 2024–2026 yang merupakan turunan dari RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024–2026. Secara lengkap rumusan rencana Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel3.5.

Tabel 3.5
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2026

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI	3	4	5	2,205,000,556
BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2	2	3	1,270,000,000
BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	2	2	9	6,355,000,000
SEKRETARIAT	1	7	40	14,859,282,165
TOTAL	8	15	57	24,689,282,721

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor tahun 2026, terdiri dari 8 Program, 15 Kegiatan, dan 57 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 37.429.545.421 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). Renja 2026 dilaksanakan secara berjenjang, Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi bertanggung jawab terhadap terlaksananya 8 Program, 15 Kegiatan, dan 57 Sub Kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan Renja, Kepala Dinas (Esselon II) memiliki tanggung jawab dalam tercapainya indikator kinerja Dinas yaitu Meningkatnya aksesibilitas koperasi dan Usaha Mikro, Meningkatnya kualitas koperasi dan Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Mikro. Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan 3 Kepala Bidang. Sekretaris (Esselon III) bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan.Kepala bidang masing bertanggung jawab terhadap pelaksanaan masing-masing 1 atau lebih program sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi bertanggung jawab atas Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Kepala Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi bertanggung jawab atas Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro bertanggung jawab atas Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM.

Program-program yang dilaksanakan oleh sekretaris dalam pelaksanaan kegiatannya dibantu oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sub Koordinator Program dan Pelaporan, Kasubag Keuangan.Sedangkan Kepala bidang dalam teknis pelaksanaan kegiatannya dibantu oleh Kepala Seksi. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana pada Tabel .4.1 :

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2026

URUSAN /UNSUR : WAJIB NON PILIHAN DASAR
BIDANG URUSAN : KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wajib Non Pilihan Dasar										
	Koperasi UKM										
I	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**		**Pertumbuhan Wirausaha**	**%**	**3.72**	**4,605,000,000.00**	Kabupaten Bogor	APBD II	**3.82**	**9,776,494,732**	
1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	59.89	4,605,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	59.90	**9,776,494,732**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan										
			Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	12.19			APBD II	12.24	-	
			Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	83.57			APBD II	84.64	-	
			Rasio Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	17.41			APBD II	17.90	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	41.57			APBD II	41.67	-	
										-	
1		Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	1436	130,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	1,536.00	**315,000,000**	
2		Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	860	150,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	920	**262,500,000**	
3		Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	140	1,525,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	140	**2,966,250,000**	
4		Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	1400	1,800,000,000	Kabupaten Bogor	DANA BAGI HASIL (DBH PUSAT) & APBD II	1400	**4,699,744,732**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	370	700,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	370	**1,050,000,000**	
6		Sub Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yang ditiingkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	190	300,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	190	**483,000,000**	
II	**Program Pengembangan UMKM**		**Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha**	**%**	**58.741**	**2,100,000,000**	Kabupaten Bogor	APBD II	**58.860**	**7,506,675,026**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Mikro Menjadi Kecil		Prosentase juumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	89.69	2,100,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	89.71	**7,506,675,026**	
1		Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	170	1,200,000,000	Kabupaten Bogor	BAGI HASIL PAJAK (PROVINSI) & APBD II	180	**4,356,675,026**	
		Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	460	450,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	180	**1,050,000,000**	
		Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	Orang	170	450,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	460	**2,100,000,000**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**		**Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Berizin**	**%**	**9.57**	**840,000,000**	Kabupaten Bogor	APBD II	**10.00**	**1,430,298,488**	
1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	8.06	700,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	8.06	**1,204,548,488**	
			Persentase fasilitasi penerbitan sertitikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	3.45			APBD II	3.45	**-**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang didorong dan dilakukan verifikasi untuk memiliki Izin Simpan Pinjam	Unit Usaha	20	700,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	20	**1,204,548,488**	
	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	%	100.00	140,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	100.00	**225,750,000**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dalam Daerah Kabupaten / Kota		kabupaten / kota								
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi simpan pinjam untuk koperasi denga wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten /kota	Jumlah Koperasi yang didorong untuk membuat izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	Unit Usaha	2	140,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	2	**225,750,000**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**		**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**%**	**31.79**	**820,000,000**	**Kabupaten Bogor**	**APBD II**	**31.83**	**1,270,424,459**	
1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	%	31.79	820,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	31.83	**1,270,424,459**	
1		Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	205	520,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	209	**776,924,459**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	166	300,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	169	**493,500,000**	
V	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**		**Persentase Koperasi Aktif**	**%**	**45.09**	**450,000,000**	Kabupaten Bogor	APBD II	**45.36**	**1,062,756,983**	
1	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	9.88	450,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	9.94	**1,062,756,983**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	83	450,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	84	**1,062,756,983**	
VI	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**		**Prosentase SDM koperasi yang dilatih**	**%**	**4.69**	**750,000,000**	Kabupaten Bogor	APBD II	**4.72**	**1,504,450,018**	
1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah kenaggotaan dalam Daerah Kabuapten/Kota		Persentase jumlah, anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	4.69	750,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	4.72	**1,504,450,018**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase jumlah, koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	38.93			APBD II	38.93	-	
			Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	3.93			APBD II	4.02	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	320	750,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	320	**1,504,450,018**	
VII	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**		**Persentase Koperasi yang Berkualitas**	**%**	**33.57**	**915,000,000**	Kabupaten Bogor	APBD II	**33.61**	**1,721,759,465**	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	7.14	915,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	7.69	**1,721,759,465**	
			Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah	%	4.17			APBD II	4.26	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota								
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	6.43			APBD II	6.51	-	
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	4.05			APBD II	4.14	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/ kota	%	22.38			APBD II	22.49	-	
1		Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	160	850,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	160	**1,648,259,465**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	0		Kabupaten Bogor	APBD II	0	-	
		Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	70	65,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	70	**73,500,000**	
VIII	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Poin**	**71.75**	**14,209,282,721**	Kabupaten Bogor	APBD II	**71.75**	**15,028,163,521**	
								APBD II			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										-	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	**509,000,000.00**	Kabupaten Bogor	APBD II	100	**729,750,000**	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	35,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	2	**52,500,000**	
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	16,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**21,000,000**	
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Dokumen	1	16,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**21,000,000**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SKPD								
4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	16,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**21,000,000**	
5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	18,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**21,000,000**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	18,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	3	**26,250,000**	
7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	360,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**525,000,000**	
8		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	30,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**42,000,000**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan		**Persentase realisasi anggaran perangkat daaerah**	**%**	**100**	**10,443,581,793.00**	Kabupaten Bogor	APBD II	**100**	**11,117,989,829**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	42	10,312,581,793	Kabupaten Bogor	DAU - BLOCK GRANT	48	**10,939,805,162**	
2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	5,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**6,300,000**	
3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	65,000,000.0	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**84,000,000**	
4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	15,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**22,679,667**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**12,600,000**	
6		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	12,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**15,435,000**	
7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	14,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**23,520,000**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	10,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**13,650,000**	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu**	**%**	**100**	**388,543,719.00**	Kabupaten Bogor	APBD II	**100**	**434,220,905**	
1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	20,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	3	**31,500,000**	
2		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	353,543,719.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**371,220,905**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	15,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	10	**31,500,000**	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum**	**%**	**100**	**817,500,000.00**	Kabupaten Bogor	APBD II	**100**	**1,073,907,237**	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	40,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**52,500,000**	
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	320,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	11	**371,002,149**	
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	55,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**88,035,460**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	70,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	4	**107,342,668**	
5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	50,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	2	**73,359,193**	
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Dokumen	1	4,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**5,250,000**	
7		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	8,500,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**11,031,785**	
8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	250,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**333,900,000**	
9		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	20,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**31,485,983**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**30,000,000.00**	Kabupaten Bogor	APBD II	**100**	**50,400,000**	
1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	9	30,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	9	**50,400,000**	
2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	-	Kabupaten Bogor	APBD II	2	**-**	
3		Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	-	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**-**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**1,624,657,209.00**	Kabupaten Bogor	APBD II	**100**	**1,119,090,371**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**5,827,500**	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	180,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**199,762,871**	
3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	1	3,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**5,250,000**	
4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,436,657,209.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**908,250,000**	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik**	**%**	**100**	**396,000,000.00**	Kabupaten Bogor	APBD II	**100**	**502,805,180**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	117,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	18	**134,400,000**	
2		Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	14,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**17,482,500**	
3		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeulair yang dipelihara	Unit	7	20,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	7	**31,500,000**	
4		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	65	55,000,000	Kabupaten Bogor	APBD II	65	**75,174,750**	
5		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1	105,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**120,408,830**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		Ket
					VOLUME	ANGGARAN (Rp) 3	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi								
6		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30	40,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	30	**63,000,000**	
7		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Unit	1	45,000,000.00	Kabupaten Bogor	APBD II	1	**60,839,100**	
		TOTAL				24,689,282,721.00		APBD II		39,301,022,691.82	

BAB V
PENUTUP

Demikian Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 telah disusun dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahapan penganggaran, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 hingga ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian substansi dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 yang telah ditetapkan mendahului penetapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, maka Renja Dinas Komunikasi dan Informatika akan disesuaikan dalam Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 di tahun berjalan.

Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika wajib melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 secara periodik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat diketahui pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta menjadi bahan rekomendasi terhadap perencanaan tahun berikutnya.

BUPATI BOGOR,

RUDY SUSMANTO